

**PENGARUH ETIKA, KOMPETENSI, DAN PENGALAMAN DALAM
MENGELOLA BARANG MILIK NEGARA TERHADAP KUALITAS
LAPORAN KEUANGAN
(Studi Pada BKKBN Provinsi Sumatera Utara)**

SKRIPSI

Oleh:

PAZLINNA DEWI

NIM. 0502173461

Program Studi

AKUNTANSI SYARIAH



**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUMATERA UTARA
MEDAN
2021**

**PENGARUH ETIKA, KOMPETENSI, DAN PENGALAMAN DALAM
MENGELOLA BARANG MILIK NEGARA TERHADAP KUALITAS
LAPORAN KEUANGAN
(Studi Pada BKKBN Provinsi Sumatera Utara)**

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Persyaratan Memperoleh Gelar Sarjana (S1)
Pada Jurusan Akuntansi Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
Universitas Islam Negeri Sumatera Utara

Oleh:

PAZLINNA DEWI

NIM. 0502173461



**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUMATERA UTARA
MEDAN
2021**

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Pazlinna Dewi
NIM : 0502173461
Tempat/Tgl. Lahir : Medan, 28 Desember 1998
Pekerjaan : Mahasiswa
Alamat : Jl. Trimurti Pasar 4 Gg Bersama 8

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa skripsi yang berjudul **“PENGARUH ETIKA, KOMPETENSI DAN PENGALAMAN DALAM MENGELOLA BARANG MILIK NEGARA TERHADAP KUALITAS LAPORAN KEUANGAN (Studi Pada BKKBN Provinsi Sumatera Utara)”** benar karya asli saya, kecuali kutipan-kutipan yang disebutkan sumbernya. Apabila terdapat kesalahan dan kekeliruan di dalamnya, sepenuhnya menjadi tanggungjawab saya.

Demikianlah surat pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Medan, Juli 2021

Yang membuat pernyataan


Pazlinna Dewi

NIM. 0502173461

PERSETUJUAN

Skripsi Berjudul:

**PENGARUH ETIKA, KOMPETENSI, DAN PENGALAMAN DALAM
MENGELOLA BARANG MILIK NEGARA TERHADAP KUALITAS
LAPORAN KEUANGAN (STUDI PADA BKKBN PROVINSI
SUMATERA UTARA)**

Oleh:

PAZLINNA DEWI

NIM. 0502173461

Dapat Disetujui Sebagai Salah Satu Persyaratan
Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Akuntansi (S.Akun)
Pada Program Studi Akuntansi Syariah

15 Juni 2021

Pembimbing I



Hendra Harmain, SE.M.Pd
NIDN. 2010057302

Pembimbing II



Atika, MA
NIDN. 0106038701

Mengetahui
Ketua Jurusan Akuntansi Syariah




Dr. Hj. Yenni Samri Juliati Nasution, MA
NIDN.2001077903

Skripsi Berjudul "**PENGARUH ETIKA, KOMPETENSI, DAN PENGALAMAN DALAM MENGELOLA BARANG MILIK NEGARA TERHADAP KUALITAS LAPORAN KEUANGAN (STUDI PADA BKKBN PROVINSI SUMATERA UTARA)**" atas Nama Pazlinna Dewi, NIM 0502173461, Program Studi Akuntansi Syariah telah di munaqasyahkan dalam Sidang Munaqasyah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Sumatera Utara Medan pada tanggal 06 Agustus 2021. Skripsi ini telah diterima untuk memenuhi syarat memperoleh gelar Sarjana Akuntansi (S.Akun) pada Program Studi Akuntansi Syariah.

Medan, 11 Agustus 2021
Panitia Sidang Munaqasyah
Program Studi Akuntansi Syariah

Ketua,


Dr. Hj. Yenni Samri J Nst. S.H.I., MA
NIDN. 2001077903

Sekretaris,


Hendra Harmain, SE, M.Pd
NIDN. 2010057302

Anggota


Pembimbing I


Hendra Harmain, SE, M.Pd
NIDN. 2010057302


Pembimbing II


Atika, MA
NIDN. 0106038701


Penguji I


Dr. Hj. Yenni Samri J Nst. S.H.I., MA
NIDN. 2001077903

Penguji II


Nur Fadhilah Ahmad Hsb, SE, M.Ak
NIDN. 2011078902

Mengetahui,
Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Islam UIN SU Medan


Dr. Muhammad Yafiz, M.Ag
NIDN.2023047602

ABSTRAK

Pazlinna Dewi (2021) “Pengaruh Etika, Kompetensi, dan Pengalaman Dalam Mengelola Barang Milik Negara Terhadap Kualitas Laporan Keuangan (Studi Pada BKKBN Provinsi Sumatera Utara)” di bawah bimbingan Hendra Harmain, M. Pd sebagai Pembimbing Skripsi I dan Atika, MA sebagai Pembimbing Skripsi II.

Aspek-aspek masalah yang diteliti oleh penulis yaitu mengenai pengaruh etika, kompetensi, dan pengalaman dalam mengelola barang milik negara terhadap kualitas laporan keuangan pada BKKBN Provinsi Sumatera Utara. Tujuan penelitian ini dilakukan untuk mengetahui pengaruh etika, kompetensi, dan pengalaman dalam mengelola barang milik negara terhadap kualitas laporan keuangan pada BKKBN Provinsi Sumatera Utara. Teknik Analisis data yang digunakan adalah dengan pendekatan kuantitatif. Pengumpulan data dilakukan dengan menyebarkan kuesioner dan hasil kuesioner diterima kembali untuk diolah. Data dianalisis dengan menggunakan program SPSS. Hasil penelitian berdasarkan uji t menunjukkan etika dalam mengelola barang milik negara berpengaruh signifikan terhadap kualitas laporan keuangan, kompetensi dalam mengelola barang milik negara berpengaruh signifikan terhadap kualitas laporan keuangan dan pengalaman dalam mengelola barang milik negara berpengaruh signifikan terhadap kualitas laporan keuangan, serta hasil penelitian berdasarkan uji F menunjukkan etika, kompetensi, dan pengalaman dalam mengelola barang milik negara secara simultan berpengaruh signifikan terhadap kualitas laporan keuangan dengan koefisien determinasi 97,2%. Dari pengujian statistik menunjukkan adanya pengaruh etika, kompetensi dan pengalaman dalam mengelola barang milik negara terhadap kualitas laporan keuangan pada BKKBN Provinsi Sumatera Utara.

Kata Kunci : Etika dalam mengelola barang milik negara, Kompetensi dalam mengelola barang milik negara, Pengalaman dalam mengelola barang milik negara, Kualitas Laporan Keuangan.

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Wr. Wb

Segala puji dan syukur penulis panjatkan kepada Allah SWT, karena berkat limpahan rahmat, hidayah dan inayahnya maka skripsi ini dapat diselesaikan dengan baik. Sholawat dan salam semoga selalu tercurahkan pada baginda Rasulullah SAW beserta seluruh keluarga, sahabat dan para pengikutnya. Alhamdulillah penulis panjatkan kepada Allah SWT yang akhirnya penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul : **“Pengaruh Etika, Kompetensi, dan Pengalaman Dalam Mengelola Barang Milik Negara Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pada Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Provinsi Sumatera Utara”**.

Skripsi ini disusun untuk memenuhi persyaratan untuk memperoleh gelar sarjana pada jurusan Akuntansi Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan. Selama penyusunan skripsi penulis banyak memperoleh bantuan dan dukungan yang sangat berharga berupa motivasi, bimbingan dan pengarahan serta saran-saran dari berbagai pihak baik secara langsung maupun tidak langsung. Maka pada kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih khususnya yang teristimewa kepada kedua orang tua saya yang sangat saya kagumi dan cintai Ayahanda Darmawi dan Ibunda Rasina yang tidak pernah lelah memberikan kasih sayang, doa, dan nasihat serta semangat yang tulus hingga saat ini.

Serta penulis juga mengucapkan terima kasih kepada :

1. Bapak Prof. Dr. Syahrin Harahap, MA selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sumatera Utara.
2. Bapak Dr. Muhammad Yafiz, M.Ag selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Sumatera Utara.
3. Ibu Dr. Hj. Yenni Samri Juliati Nasution, S.H.I, M.A selaku ketua Jurusan Akuntansi Syariah Universitas Islam Negeri Sumatera Utara.

4. Bapak Hendra Harmain, M.Pd selaku Sekretaris Jurusan Akuntansi Syariah Universitas Islam Negeri Sumatera Utara sekaligus Penasehat Akademik dari Semester I-VIII, yang telah banyak memberikan arahan, bimbingan, nasehat, dan pemahaman dalam menyelesaikan akademik ini, dan juga Pembimbing I skripsi yang telah banyak memberikan bimbingan dan masukan serta saran-saran dari awal penyusunan skripsi sampai dengan selesai.
5. Ibu Atika, MA selaku dosen Pembimbing II skripsi yang telah banyak memberikan bimbingan dan masukan serta saran-saran dari awal penyusunan skripsi sampai dengan selesai.
6. Terima kasih kepada seluruh Dosen dan Staff Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam yang telah memberikan ilmu yang luar biasa serta membantu penulis dalam kegiatan perkuliahan.
7. Para pegawai BKKBN Provinsi Sumatera Utara yang telah mengizinkan penulis melakukan penelitian dan banyak memberikan bantuan selama penulis melakukan penelitian.
8. Terima kasih kepada Kakak, Abang dan Adik tersayang Patrisna Dewi, Syofiana Dewi, Budi Darma Putra, Mahadi Winafil, S.Kom, dan Intan Sarawina yang telah memberikan doa dan semangat serta dukungan motivasi dalam menyelesaikan skripsi ini.
9. Kepada teman-temanku Niswaton Mujahiddah, Maya Sartika Sirait, Nofiah Isnaini Nasution, Yuli Windriyani, Melani Manurung, dan Nirwana Afiah Hidayati yang selalu memberikan doa, motivasi, semangat dan dukungan yang tiada henti-hentinya di setiap perjuanganku kuliah di UIN-SU.
10. Kepada Muhammad Ilham Kholid teman ku dari SD hingga Kuliah yang telah banyak mendukung dan banyak membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
11. Kepada temanku Khairul Nisah, Chairani pulungan yang telah banyak mendukung dan memberikan semangat kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
12. Kepada seluruh teman-teman Akuntansi Syariah C (AKS-C) Stambuk 2017 yang sama-sama berjuang menyelesaikan skripsi.

13. Keluarga besar HMJ AKS UINSU yang banyak memberi pengalaman kepada penulis.
14. Terima kasih kepada semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu per satu oleh penulis yang mendukung serta banyak membantu penulis mengumpulkan data dan informasi untuk penyusunan skripsi ini.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan, oleh karena itu penulis mengharapkan kritik dan saran yang membangun dari berbagai pihak. Akhirnya, kepada Allah jualah penulis memohon ampun dan menyerahkan diri, semoga skripsi ini bisa bermanfaat bagi siapa saja yang membacanya. Aamiin Ya Rabbal Aalamiin.

Wassalamualaikum Wr.Wb.

Medan, Juni 2021
Penulis

Pazlinna Dewi
NIM.0502173461

DAFTAR ISI

PERSETUJUAN.	i
ABSTRAK.	iii
KATA PENGANTAR.	iv
DAFTAR ISI.	vii
DAFTAR TABEL.	xi
DAFTAR GAMBAR.	xii
BAB 1 PENDAHULUAN.	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Identifikasi Masalah.....	6
C. Batasan Masalah.	6
D. Perumusan Masalah.	7
E. Tujuan dan Manfaat Penelitian.....	7
BAB II KAJIAN TEORITIS.	9
A. Kajian Teori.....	9
1. Kualitas Laporan Keuangan.....	9
a. Pengertian Laporan Keuangan.	9
b. Tujuan Laporan Keuangan.	12
c. Karakteristik Laporan Keuangan.....	13
d. Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Kualitas Laporan Keuangan.....	15
2. Etika.....	17
a. Pengertian Etika.....	17
b. Etika Dalam Islam.	18
c. Indikator Etika.	19
3. Kompetensi.	19
a. Pengertian Kompetensi.	19

b. Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Kompetensi.	20
c. Kompetensi Perspektif Islam.....	22
d. Indikator Kompetensi.....	22
4. Pengalaman.....	23
a. Pengertian Pengalaman.....	23
b. Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Pengalaman.....	24
c. Pengalaman Dalam Pandangan Islam.....	25
d. Indikator Pengalaman.....	26
5. Pengelolaan Barang Milik Negara.....	26
B. Penelitian Sebelumnya.....	28
C. Kerangka Teoritis.....	30
D. Hipotesis.....	30
BAB III METODE PENELITIAN.....	32
A. Pendekatan Penelitian.....	32
B. Lokasi dan Waktu Penelitian.....	32
1. Lokasi Penelitian.....	32
2. Waktu Penelitian.....	32
C. Populasi dan Sampel.....	32
1. Populasi.....	32
2. Sampel.....	33
D. Data Penelitian.....	33
E. Teknik Pengumpulan Data.....	34
F. Definisi Operasional.....	35
G. Teknik Analisa Data.....	36
1. Statistik Deskriptif.....	37
2. Uji Kualitas Data.....	37
a. Uji Validitas.....	37
b. Uji Realibilitas.....	37
3. Uji Asumsi Klasik.....	38
a. Uji Normalitas.....	38

b. Uji Multikolinieritas.	38
c. Uji Heteroskedastisitas.....	39
4. Uji Hipotesis Penelitian.	39
a. Ujian Koefisien Determinasi.	39
b. Uji Parsial.....	40
c. Uji F (<i>F-test</i>).....	40
I. Uji Regresi Linier Berganda.....	41
BAB IV TEMUAN PENELITIAN.	42
A. Hasil Penelitian.	42
1. Sejarah BKKBN Provinsi Sumatera Utara.	42
2. Visi dan Misi BKKBN Provinsi Sumatera Utara.....	43
a. Visi BKKBN Provinsi Sumatera Utara.....	43
b. Misi BKKBN Provinsi Sumatera Utara.....	44
3. Tugas Pokok dan Fungsi BKKBN Provinsi Sumatera Utara.	44
a. Tugas Pokok BKKBN Provinsi Sumatera Utara.....	44
b. Fungsi BKKBN Provinsi Sumatera Utara.....	45
4. Struktur Organisasi BKKBN Provinsi Sumatera Utara. ...	46
B. Dekripsi Data Penelitian.	48
1. Uji Deskriptif.	48
a. Distribusi Frekuensi Responden Berdasarkan Jenis Kelamin.	48
b. Distribusi Frekuensi Responden Berdasarkan Usia.....	49
c. Distribusi Frekuensi Responden Berdasarkan Pendidikan.	50
d. Distribusi Frekuensi Responden Berdasarkan Masa Kerja.	50
e. Hasil Analisis Statistik Deskriptif.	51
2. Uji Kualitas Data.....	52
a. Uji Validitas.	52

b. Uji Realibilitas.....	57
C. Uji Asumsi Klasik.....	59
1. Uji Normalitas.....	59
2. Uji Multikoleniaritas.	61
3. Uji Heteroskedastisitas.	62
D. Uji Hipotesis.	63
1. Uji Koefisien Determinasi (R^2).....	63
2. Uji t (<i>t-test</i>).....	63
3. Uji F (<i>F test</i>).....	65
E. Uji Regresi Linier Berganda.....	65
F. Pembahasan.	67
BAB V PENUTUP.....	72
A. Kesimpulan.....	72
B. Saran.....	73
DAFTAR PUSTAKA.....	75
LAMPIRAN.....	77
DAFTAR RIWAYAT HIDUP.....	97

DAFTAR TABEL

Tabel	Hal
2.1 Penelitian Sebelumnya.....	28
3.1 Jumlah Pegawai Yang Terlibat Dalam Pengelola BMN & Laporan Keuangan.....	33
3.2 Skala Likert.	34
3.3 Definisi Operasional Varabel.	35
4.1 Data Sampel Penelitian.	48
4.2 Distribusi Frekuensi Responden Berdasarkan Jenis Kelamin.	49
4.3 Distribusi Frekuensi Responden Berdasarkan Usia.	49
4.4 Distribusi Frekuensi Responden Berdasarkan Pendidikan.....	50
4.5 Distribusi Frekuensi Responden Berdasarkan Masa Kerja.	51
4.6 Statistik Deskriptif.	51
4.7 Uji Validitas Etika.	53
4.8 Uji Validitas Kompetensi.	54
4.9 Uji Validitas Pengalaman.....	55
4.10 Uji Validitas Kualitas Laporan Keuangan.	56
4.11 Hasil Uji Realibilitas Etika.....	57
4.12 Hasil Uji Realibilitas Kompetensi.	57
4.13 Hasil Uji Realibilitas Pengalaman.	58
4.14 Hasil Uji Realibilitas Kualitas Laporan Keuangan.....	58
4.15 Hasil Uji Normalitas.	60
4.16 Uji Multikoleniaritas.....	61
4.17 Uji Heterokedastisitas.	62
4.18 Uji R^2	63
4.19 Uji t.	64
4.20 Uji F.	65
4.21 Hasil Uji Analisis Regresi Linier Berganda.	66

DAFTAR GAMBAR

Gambar	Hal
2.1 Kerangka Teoritis.	30
4.1 Struktur Organisasi	46
4.2 Histogram <i>Display Normal Curve</i>	59
4.3 Uji Normalitas Dengan Uji P-Plot.	60

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pada dasarnya, setiap pembaharuan dan perubahan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara adalah terwujudnya pemerintahan yang demokratis guna menciptakan sistem pemerintahan yang lebih baik (*good governance*). Tujuan pokok *good governance* adalah tercapainya kondisi pemerintahan yang dapat menjamin kepentingan pelayanan publik secara seimbang dengan melibatkan kerjasama antar semua komponen pelaku (negara, masyarakat madani, lembaga-lembaga masyarakat, dan pihak swasta).¹ Pemerintahan yang baik merupakan suatu bentuk keberhasilan dalam menjalankan tugas untuk membangun negara dan mensejahterakan masyarakat sesuai dengan tujuan yang telah direncanakan. Untuk pencapaian tujuan tersebut setiap pemerintahan harus dapat mengelola sumber daya yang ada di negara salah satunya adalah pengelolaan aset negara atau Barang Milik Negara (BMN).

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara melalui Pasal 49 ayat (6) mengamanatkan Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah diatur dalam Peraturan Pemerintah. Selanjutnya, Pemerintah membentuk Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah, yang menjadi dasar bagi Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah dalam melaksanakan pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang pengelolaan barang milik negara/daerah, disebutkan bahwa Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 Tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah sudah tidak sesuai dengan perkembangan pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah, sehingga perlu

¹ Miftah Thoha, *Kepemimpinan dalam Manajemen Edisi 12*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2007), h.7.

diganti. Dalam Peraturan Pemerintah ini yang dimaksud dengan Barang Milik Negara adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau berasal dari perolehan lainnya yang sah. Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah dilaksanakan berdasarkan asas fungsional, kepastian hukum, transparansi, efisiensi, akuntabilitas, dan kepastian nilai.²

Kualitas laporan keuangan pemerintah merupakan permasalahan yang sangat penting untuk dibahas terkait dengan transparansi dan akuntabilitas dalam laporan keuangan, banyaknya kasus-kasus mengenai buruknya kualitas laporan keuangan pemerintah di Indonesia masih menjadi isu hangat yang perlu dikaji lebih dalam. Hal ini tidak bisa kita lepaskan dari faktor-faktor yang mempengaruhi kualitas laporan keuangan salah satunya yaitu pengelolaan barang milik negara. Karena jika pengelolaan aset tersebut kurang diterapkan secara maksimal maka dapat memberikan pengaruh negatif terhadap kualitas laporan keuangan.

Salah satu perwujudan nyata dari penerapan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan negara adalah melalui penyusunan laporan keuangan pemerintahan yang relevan dan andal, yang disusun berdasarkan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) dan sistem akuntansi yang menyediakan prosedur pemrosesan transaksi sampai menjadi laporan keuangan. Laporan keuangan pemerintah yang dihasilkan harus memenuhi prinsip-prinsip tepat waktu dan disusun dengan mengikuti Standar Akuntansi Pemerintahan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010. Karakteristik kualitatif yang disyaratkan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan, yakni relevan, andal, dapat dibandingkan, dan dapat dipahami.³

Sumber Daya Manusia (SDM) memiliki peran utama dalam setiap kegiatan, termasuk dalam pengelolaan barang milik negara. Agar laporan

² Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah

³ Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan Paragraf 35-40, h.10.

keuangan berkualitas, maka pengelolaan aset yang baik pun diperlukan dukungan dan kesiapan pegawai yang maksimal. Dalam mengelola BMN, etika pegawai merupakan hal yang harus diperhatikan. Begitu juga dalam melakukan pekerjaan karena akan mempengaruhi hasil sebuah pekerjaan tersebut. Etika adalah sebuah ilmu yang mempelajari bagaimana berperilaku jujur, benar, dan adil. Etika merupakan cabang ilmu filsafat, mempelajari perilaku moral dan amoral, membuat pertimbangan matang yang patut dilakukan oleh seseorang kepada orang lain atau kelompok tertentu.⁴ Setiap individu Dalam pelaksanaan tugas profesinya harus memperhatikan etika profesi, seperti dalam pemanfaatan wewenang, menjalin koneksi, membangun karakter, dan dalam penyusunan anggaran perusahaan. Begitu pula profesi sebagai seorang pengelola aset.

Untuk Memperoleh Laporan keuangan yang berkualitas dibutuhkan pegawai yang mempunyai kompetensi dalam membuat laporan keuangan. Kompetensi merupakan suatu kemampuan atau kecakapan yang dimiliki oleh seseorang dalam melaksanakan suatu pekerjaan atau tugas di bidang tertentu, sesuai dengan jabatan yang disandangnya. Dengan kata lain, kompetensi tidak hanya tentang pengetahuan atau kemampuan seseorang, namun kemauan melakukan apa yang diketahui sehingga menghasilkan manfaat. Menurut Jack Gordon (1998), ada 6 aspek yang terkandung dalam konsep kompetensi, yaitu: Pengetahuan (*knowledge*), Pemahaman (*understanding*), Kemampuan (*skill*), Nilai (*value*), Sikap (*attitude*), Minat (*interest*).⁵

Dalam menyusun laporan keuangan, semakin lama pegawai bekerja dalam suatu bidang maka semakin berpengalaman pegawai tersebut dan semakin memahami apa yang menjadi tugas dan tanggung jawab yang diberikan kepada pegawai tersebut. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI, 2013), pengalaman adalah sesuatu yang pernah (dialami, dijalani, dirasai, ditanggung, dan sebagainya) bisa berupa peristiwa baik maupun yang buruk. Menurut Ranupandojo, (1984) mengemukakan pengalaman kerja adalah ukuran

⁴ Saban Echdar dan Maryadi, *Business Ethics and Entrepreneurship (Etika & Kewirausahaan)*, (Yogyakarta: Deeplublish, 2019), h.1.

⁵Maxmanroe, "Pengertian Kompetensi: Definisi, Jenis-jenis dan Manfaat Kompetensi", <https://www.maxmanroe.com/vid/manajemen/pengertian-kompetensi.html>.

tentang lama waktu atau masa kerja yang telah ditempuh seseorang dapat memahami tugas-tugas suatu pekerjaan dan telah melaksanakan dengan baik. Oleh sebab itu, pengalaman pribadi pegawai dalam membuat sebuah laporan keuangan dapat dijadikan pengetahuan dan informasi.

Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional adalah Lembaga Pemerintah Nonkementerian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden melalui Menteri Kesehatan. Salah satu tugas BKKBN adalah pengelolaan barang milik/kekayaan negara yang menjadi tanggung jawab BKKBN.

Dalam tiga tahun terakhir, BKKBN mendapatkan opini wajar tanpa pengecualian. Hal ini tentu capaian yang luar biasa, akan tetapi opini WTP bukan berarti benar tanpa pengecualian melainkan WTP artinya masih ada temuan-temuan yang masih harus ditindaklanjuti dan dicari solusinya. Hal ini dapat dilihat dari Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional dimana dalam mempertahankan WTP tersebut masih terdapat beberapa permasalahan dalam pengelolaan barang milik negara yaitu pengelolaan persediaan di lingkungan BKKBN masih belum sesuai dengan peraturan yang berlaku, masih terdapat selisih antara satker pusat dengan satker provinsi selaku penerima, serta belum seluruh barang barang persediaan di lingkungan BKKBN dicatat di dalam kartu persediaan. Dan juga kurangnya pemahaman terhadap SOP pengelolaan keuangan dan BMN serta keterbatasan SDM pengelola yang sesuai dengan kualitas dan kuantitas.⁶ Mengingat pentingnya pengelolaan barang milik negara pada laporan keuangan yang berkualitas, tentu hal ini merupakan permasalahan yang harus segera diperbaiki.

Begitupun BKKBN Provinsi Sumatera Utara, dalam pengelolaan aset masih terdapat permasalahan seperti aset yang sering berpindah tempat sehingga tidak sesuai dengan daftar lokasi inventarisnya lagi. Hal ini tentu dapat berakibat pada inventarisasi aset yaitu pelaporan hasil pendataan aset. selain itu sering

⁶ Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional

terjadi persediaan yang tidak tercatat. Dan permasalahan lainnya yaitu kurangnya Sumber Daya Manusia (SDM) pada BKKBN Provinsi Sumatera Utara. Sedangkan untuk memperoleh laporan keuangan yang berkualitas, tentunya terdapat kontribusi pegawai-pegawai pengelola laporan keuangan salah satunya Pengelola Aset Barang Milik Negara. Sedangkan pada BKKBN Provinsi Sumatera Utara, agar dapat mempertahankan laporan keuangan yang berkualitas, maka dalam pengelolaan barang milik negara haruslah didukung sumber daya manusia yang maksimal dalam melakukan pekerjaannya. Akan tetapi, berdasarkan hasil pengamatan dan wawancara kepada salah satu staff yang bekerja di bagian keuangan dan pengelolaan bmn pada tanggal 01 Desember 2020, diketahui kurangnya sumber daya manusia yang berkualitas. Hal ini dibuktikan dari etika, kompetensi dan pengalaman dalam mengelola barang milik negara masih rendah. Hal ini terlihat adanya pegawai yang tidak bekerja dengan penuh pengabdian dan tanggung jawab, rendahnya pegawai yang berperilaku sesuai dengan etika, pegawai yang kurang kompeten dalam melakukan tugasnya, adanya pegawai yang tidak disiplin dalam tugasnya, kemampuan pegawai yang kurang dalam pengelolaan aset, dan pegawai yang tidak menyelesaikan tugas tepat waktu.⁷

Jika hal tersebut dibiarkan, maka akan mempengaruhi laporan BKKBN yang sudah mendapatkan opini WTP. Dengan adanya permasalahan tersebut, akan berdampak pada pengelolaan aset yang kurang baik. Jika pengelolaan aset tidak baik maka akan mempengaruhi kualitas laporan keuangan yang baik pula. Karena pada dasarnya tingginya kualitas laporan keuangan juga didasarkan pada sumber daya manusia yang berkualitas pula dalam melaksanakan tugasnya terutama pengelolaan barang milik negara.

Penelitian ini akan menguji apakah etika, kompetensi dan pengalaman dalam mengelola barang milik negara di BKKBN Provinsi Sumatera Utara memiliki pengaruh terhadap kualitas laporan keuangan. Berdasarkan latar belakang tersebut, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan

⁷ Wawancara dengan Manuntun Royen Andreas Damanik bertugas bagian keuangan dan pengelolaan bmn di BKKBN Provinsi Sumut, tanggal 1 Desember 2020 di Medan

judul “ **Pengaruh Etika, Kompetensi, Dan Pengalaman Dalam Mengelola Barang Milik Negara Terhadap Kualitas Laporan Keuangan [Studi Pada Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Provinsi Sumatera Utara]**”

B. Identifikasi Masalah

BKKBN yang mendapatkan opini WTP tetapi dalam mempertahankan opini tersebut masih ditemukan permasalahan seperti pada BKKBN Provinsi Sumatera Utara dimana dalam mengelola BMN masih terdapat permasalahan seperti aset yang sering berpindah tempat sehingga tidak sesuai dengan daftar lokasi inventarisnya lagi. Hal ini tentu dapat berakibat pada inventarisasi aset yaitu pelaporan hasil pendataan aset. selain itu sering terjadi persediaan yang tidak tercatat. Dan permasalahan lainnya masih minimnya sumber daya manusia yang berkualitas. Agar dapat mempertahankan laporan keuangan yang berkualitas, maka pengelolaan aset merupakan unsur yang penting. Untuk memperoleh pengelolaan aset yang baik maka didukung sumber daya manusia yang berkualitas pula. Berdasarkan latar belakang penelitian diatas, maka penulis mengemukakan identifikasi masalah sebagai berikut.

1. Kurangnya etika pegawai dalam mengelola barang milik negara
2. Kurangnya kompetensi dan pengalaman pengelola aset yang memadai untuk mengelola aset dengan baik sehingga kurang profesional dan tanggung jawab dalam melaksanakan tugas
3. Pengelolaan aset yang kurang baik

C. Batasan Masalah

Berdasarkan permasalahan diatas maka perlu pembatasan untuk memfokuskan pembahasan, maka penelitian ini dibatasi pada satu variabel terikat dan tiga variabel bebas. Variabel terikat penelitian ini adalah kualitas laporan keuangan, sedangkan variabel bebas penelitian ini adalah etika, Kompetensi, dan Pengalaman dalam mengelola barang milik negara.

D. Perumusan Masalah

1. Apakah etika berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan dalam mengelola Barang Milik Negara di BKKBN Provinsi Sumatera Utara?
2. Apakah kompetensi berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan dalam mengelola Barang Milik Negara di BKKBN Provinsi Sumatera Utara?
3. Apakah pengalaman berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan dalam mengelola Barang Milik Negara di BKKBN Provinsi Sumatera Utara?
4. Apakah etika, kompetensi, dan pengalaman dapat berpengaruh secara simultan terhadap kualitas laporan keuangan dalam mengelola Barang Milik Negara di BKKBN Provinsi Sumatera Utara?

E. Tujuan dan Manfaat Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, adapun tujuan dari hasil penelitian ini antara lain:

- a. Untuk mengetahui pengaruh etika terhadap kualitas laporan keuangan dalam mengelola Barang Milik Negara di BKKBN Provinsi Sumatera Utara
- b. Untuk mengetahui pengaruh kompetensi terhadap kualitas laporan keuangan dalam mengelola Barang Milik Negara di BKKBN Provinsi Sumatera Utara
- c. Untuk mengetahui pengaruh pengalaman terhadap kualitas laporan keuangan dalam mengelola Barang Milik Negara di BKKBN Provinsi Sumatera Utara
- d. Untuk mengetahui pengaruh etika, kompetensi, dan pengalaman secara simultan terhadap kualitas laporan keuangan dalam mengelola Barang Milik Negara di BKKBN Provinsi Sumatera Utara

Dari hasil penelitian yang dilakukan diharapkan dapat memberikan manfaat, antara lain:

a. Bagi Penulis

Bagi Penulis Sendiri penelitian diharapkan menjadi sarana untuk menambah pengetahuan tentang Pengaruh Etika, Kompetensi, dan Pengalaman Dalam Mengelola Barang Milik Negara terhadap kualitas Laporan Keuangan. Kedepannya diharapkan menjadi acuan bagi peneliti berikutnya, dalam rangka pengembangan ilmu mengenai topik ini.

b. Bagi Masyarakat umum/pihak lain

Penelitian ini sebagai informasi lebih lanjut untuk memberikan gambaran yang jelas tentang bagaimana pengaruh etika, kompetensi, dan pengalaman dalam mengelola BMN terhadap kualitas laporan keuangan.

c. Bagi peneliti selanjutnya

Untuk peneliti selanjutnya dapat menjadi bahan referensi untuk melakukan penelitian yang sama juga dan dapat dijadikan sebagai bahan tambahan pertimbangan dan pemikiran dalam penelitian lebih lanjut dalam bidang yang sama, yaitu Pengaruh Etika, Kompetensi, dan Pengalaman Dalam Mengelola Barang Milik Negara terhadap kualitas Laporan Keuangan.

d. Bagi Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional

Penelitian ini dapat menjadi tambahan literatur yang dapat menjadi rujukan dalam pengambilan keputusan, untuk menganalisis Pengelolaan Barang Milik Negara Terhadap Kualitas Laporan Keuangan.

BAB II

KAJIAN TEORITIS

A. Kajian Teori

1. Kualitas Laporan Keuangan

a. Pengertian Laporan Keuangan

Laporan keuangan merupakan laporan yang terstruktur mengenai posisi keuangan dan transaksi-transaksi yang dilakukan oleh suatu entitas pelaporan. Laporan keuangan disusun untuk menyediakan informasi yang relevan mengenai posisi keuangan dan seluruh transaksi yang dilakukan oleh suatu entitas pelaporan selama satu periode pelaporan.

Laporan keuangan terutama digunakan untuk mengetahui nilai sumber daya ekonomi yang dimanfaatkan untuk melaksanakan kegiatan operasional pemerintahan, menilai kondisi keuangan, mengevaluasi efektivitas dan efisiensi suatu entitas pelaporan dan membantu menentukan ketaatannya terhadap peraturan perundang-undangan. Setiap entitas pelaporan mempunyai kewajiban untuk melaporkan upaya-upaya yang telah dilakukan serta hasil yang dicapai dalam pelaksanaan kegiatan secara sistematis dan terstruktur pada suatu periode pelaporan untuk kepentingan:

1) Akuntabilitas

Mempertanggungjawabkan pengelolaan sumber daya serta pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan kepada entitas pelaporan dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan secara periodik.

2) Manajemen

Membantu para pengguna untuk mengevaluasi pelaksanaan kegiatan suatu entitas pelaporan dalam periode pelaporan.

3) Transparansi

Memberikan informasi keuangan yang terbuka dan jujur kepada masyarakat berdasarkan pertimbangan bahwa masyarakat memiliki hak untuk mengetahui secara terbuka dan menyeluruh atas pertanggungjawaban

pemerintah dalam pengelolaan sumber daya yang dipercayakan kepadanya dan ketaatannya pada peraturan perundang-undangan.

4) Keseimbangan Antargenerasi

Membantu para pengguna dalam mengetahui kecukupan penerimaan pemerintah pada periode pelaporan untuk membiayai seluruh pengeluaran yang dialokasikan dan apakah generasi yang akan datang diasumsikan akan ikut menanggung beban pengeluaran tersebut.

5) Evaluasi Kinerja

Mengevaluasi kinerja entitas pelaporan, terutama dalam penggunaan sumber daya ekonomi yang dikelola pemerintah untuk mencapai kinerja yang direncanakan.⁸

Dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor. 171/PMK.05/2007 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat disebutkan bahwa Laporan Keuangan adalah bentuk pertanggungjawaban pemerintah atas pelaksanaan APBN berupa Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Arus Kas dan Catatan Atas Laporan Keuangan. Neraca yang digunakan untuk menyusun Laporan Keuangan menyajikan informasi posisi keuangan pemerintah yaitu aset, utang dan ekuitas dana pada tanggal tertentu. Nilai Aset yang terdapat dalam Neraca Keuangan antara lain didapatkan dari Laporan Barang Milik Negara.⁹

Menurut Peraturan Dirjen Kekayaan Negara Nomor PER07/KN/2009 tentang Tata Cara Pelaksanaan Rekonsiliasi Data Barang Milik Negara dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Negara dan Laporan Keuangan Pemerintah Pusat pasal 1, Laporan Barang Milik Negara adalah laporan yang menyajikan posisi BMN pada awal dan akhir suatu periode serta mutasi BMN yang terjadi selama periode tersebut.¹⁰

⁸ Halkadri Fitra, *Analisis Neraca Dan Laporan Realisasi Anggaran Pemerintah Daerah*, (Malang: CV IRDH, 2019). h.2-6.

⁹ Peraturan Menteri Keuangannomor 171 /Pmk.05/2007 Tentang Sistem Akuntansi Dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat

¹⁰ Peraturan Direktur Jenderal Kekayaan Negara Nomor : Per-07/Kn/2009 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Rekonsiliasi Data Barang Milik Negara Dalam Rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Negara Dan Laporan Keuangan Pemerintah Pusat

Pemerintah berkewajiban untuk memberikan informasi keuangan yang akan digunakan untuk pengambilan keputusan ekonomi, sosial, dan politik oleh pihak-pihak yang berkepentingan. Laporan keuangan untuk mendukung pembuatan keputusan ekonomi, sosial dan politik tersebut meliputi informasi yang digunakan untuk: (a) membandingkan kinerja keuangan aktual dengan yang dianggarkan, (b) menilai kondisi keuangan dan hasil-hasil operasi, (c) membantu menentukan tingkat kepatuhan terhadap peraturan perundangan yang terkait dengan masalah keuangan dan ketentuan lainnya, serta (d) membantu dalam mengevaluasi efisiensi dan efektivitas.¹¹

Awal tahun 2003 penerapan akuntansi syariah di Indonesia baru muncul dan perkembangan lembaga keuangan syariah pada saat itu menghimbau agar semua sistem yang ada baik secara prinsip ataupun prakteknya harus sesuai dengan tuntunan syariah. Penerapan akuntansi syariah di Indonesia memberi dampak positif pada perkembangan sistem keuangan yang berbasis syariah. Hal ini penting karena meskipun fungsi utama akuntansi syariah tersebut sama dengan yang lain, tetapi konsep yang digunakan berbeda karena mengacu pada hukum syariah, semisal pemberlakuan akrual dancashbasis pada akuntansi syariah menurut pada prinsip bagi hasil yang digunakan, sedangkan pada akuntansi konvensional pada umumnya berbasis akrual.¹²

Dalam islam, terdapat laporan keuangan syariah. Laporan keuangan syariah adalah terstruktur dari posisi laporan keuangan dan kinerja keuangan dari suatu entitas syariah. Pencatatan transaksi merupakan perintah Allah SWT dalam QS AlBaqarah ayat 282, yang dituangkan dalam lembaran kertas sebagai bukti telah melakukan pencatatan yang disebut dengan bukti transaksi. Dalam konteks yang lebih luas, setiap umat manusia bermuamalat yang menimbulkan transaksi baik dalam skala kecil maupun besar harus mencatatkannya. Secara filosofis tujuan pencatatan adalah untuk menghindari kesalahan karena manusia bersifat lupa baik yang bersifat kewajiban maupun yang menjadi hak bagi setiap

¹¹ Mardiasmo, *Akuntansi Sektor Publik*, (Yogyakarta: CV Andi Offset, 2018), h.203.

¹² Atika, "Analisis Penerapan Akuntansi Syariah sistem Bagi Hasil Dalam Program Tabungan Bank Syariah Mandiri Cabang medan" dalam *Jurnal Ekonomi Islam*, Volume V, No. 1 Januari – Juni 2020, h.163 -182.

manusia yang bermuamalat. Hal ini dinyatakan dalam Q.S Al-Baqarah (2):282, yaitu:¹³

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدِينٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَآكْتُوبُوهُ ۚ وَلْيَكْتُب بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ

Artinya:

“Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu'amalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. Dan hendaklah seorang penulis di antara kamu menuliskannya dengan benar.”

b. Tujuan Laporan Keuangan

Pelaporan keuangan pemerintah seharusnya menyajikan informasi yang bermanfaat bagi para pengguna dalam menilai akuntabilitas dan membuat keputusan baik keputusan ekonomi, sosial, maupun politik dengan:

- 1) Menyediakan informasi tentang sumber, alokasi dan penggunaan sumber daya keuangan
- 2) Menyediakan informasi mengenai kecukupan penerimaan periode berjalan untuk membiayai seluruh pengeluaran
- 3) Menyediakan informasi mengenai jumlah sumber daya ekonomi yang digunakan dalam kegiatan entitas pelaporan serta hasil-hasil yang telah dicapai
- 4) Menyediakan informasi mengenai bagaimana entitas pelaporan mendanai seluruh kegiatannya dan mencukupi kebutuhan kasnya
- 5) Menyediakan informasi mengenai posisi keuangan dan kondisi entitas pelaporan berkaitan dengan sumber-sumber penerimaannya, baik jangka pendek maupun jangka panjang, termasuk yang berasal dari pungutan pajak dan pinjaman
- 6) Menyediakan informasi mengenai perubahan posisi keuangan entitas pelaporan, apakah mengalami kenaikan atau penurunan, sebagai akibat kegiatan yang dilakukan selama periode pelaporan

¹³ Syahman Sitompul, et. al., *Akuntansi Masjid*, (Medan: FEBI UIN-SU Press, 2015), h. 7.

Untuk memenuhi tujuan-tujuan tersebut, laporan keuangan menyediakan informasi mengenai sumber dan penggunaan sumber daya keuangan/ekonomi, transfer, pembiayaan, sisa lebih/kurang pelaksanaan anggaran, saldo anggaran lebih, surplus/defisit-Laporan Operasional (LO), aset, kewajiban, ekuitas, dan arus kas suatu entitas pelaporan.¹⁴

c. Karakteristik Laporan Keuangan

Laporan keuangan adalah hasil akhir dari proses akuntansi sehingga harus memiliki karakteristik kualitas yang baik. Karakteristik kualitatif laporan keuangan adalah ukuran-ukuran normatif yang perlu diwujudkan dalam informasi akuntansi sehingga dapat memenuhi tujuannya. Keempat karakteristik berikut ini merupakan prasyarat normatif yang diperlukan agar laporan keuangan pemerintah dapat memenuhi kualitas yang dikendaki:

1) Relevan

Laporan keuangan bisa dikatakan relevan apabila informasi yang termuat didalamnya dapat mempengaruhi keputusan pengguna dengan membantu mereka mengevaluasi peristiwa masa lalu atau masa kini, dan memprediksi masa depan, serta menegaskan atau mengoreksi hasil evaluasi mereka dimasa lalu. Informasi yang relevan memiliki karakteristik:

a) Memberikan manfaat umpan balik (*feedback value*)

Informasi memungkinkan pengguna untuk menegaskan atau mengoreksi ekspektasi mereka di masa lalu. Laporan keuangan berkualitas jika dapat memberikan manfaat untuk evaluasi kinerja masa lalu dan memberikan umpan balik dalam rangka perencanaan keuangan dan perbaikan kinerja di masa datang.

b) Memberikan manfaat prediktif (*predictive value*)

Informasi dapat membantu pengguna untuk memprediksi masa yang akan datang berdasarkan hasil masa lalu dan kejadian masa kini. Laporan keuangan berkualitas jika dapat memberikan manfaat untuk memprediksi kondisi keuangan, kebutuhan keuangan, dan kinerja di masa datang.

¹⁴ Ifat Fauziah, *SAP Standar Akuntansi Pemerintah*, (Pamulang: ILMU, 2018), h.27.

c) Disajikan tepat waktu (*timeliness*)

Informasi disajikan tepat waktu sehingga dapat berpengaruh dan berguna dalam pengambilan keputusan.

d) Lengkap

Informasi akuntansi keuangan pemerintah disajikan lengkap mungkin, mencakup semua informasi akuntansi yang dapat mempengaruhi pengambilan keputusan dengan memperhatikan kendala yang ada.

2) Andal

Laporan keuangan dikatakan andal apabila bebas dari pengertian yang menyesatkan dan kesalahan material, menyajikan setiap fakta secara jujur, serta dapat diverifikasi. Informasi mungkin relevan, tetapi jika hakikat atau penyajiannya tidak dapat diandalkan maka penggunaan informasi tersebut secara potensial dapat menyesatkan. Informasi yang andal memenuhi karakteristik:

a) Penyajian jujur (*faithfulness of presentation*)

Informasi menggambarkan dengan jujur transaksi serta peristiwa lainnya yang seharusnya disajikan atau yang secara wajar dapat diharapkan untuk disajikan

b) Dapat diverifikasi (*verifiability*)

Informasi yang disajikan dalam laporan keuangan dapat diuji dan apabila pengujian dilakukan lebih dari sekali oleh pihak yang berbeda, hasilnya tetap menunjukkan kesimpulan yang tidak berbeda jauh.

c) Netralitas

Informasi diarahkan pada kebutuhan umum dan tidak berpihak pada kebutuhan pihak tertentu.

3) Dapat dibandingkan

Informasi yang termuat dalam laporan keuangan akan lebih berguna jika dapat dibandingkan dengan laporan keuangan periode sebelumnya atau laporan keuangan entitas pelaporan lain pada umumnya. Perbandingan dapat dilakukan secara internal dan eksternal. Perbandingan secara internal dapat dilakukan apabila suatu entitas menerapkan kebijakan akuntansi yang sama dari tahun ke

tahun. Perbandingan secara eksternal dapat dilakukan bila entitas yang diperbandingkan menerapkan kebijakan akuntansi yang sama. Apabila entitas pemerintah menerapkan kebijakan akuntansi yang lebih baik daripada kebijakan akuntansi yang sekarang diterapkan, perubahan tersebut diungkapkan pada periode terjadi perubahan.

4) Dapat dipahami

Informasi yang disajikan dalam laoran keuangan dapat dipahami oleh pengguna dan dinyatakan dalam bentuk serta istilah yang disesuaikan dengan batas pemahaman para pengguna. Untuk itu, pengguna diasumsikan memiliki pengetahuan yang memadai atas kegiatan dan lingkungan operasi entitas pelaporan, serta adanya, kemauan pengguna untuk mempelajari informasi yang dimaksud.¹⁵

d. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kualitas Laporan Keuangan

Hasil kajian tentang penentu kualitas laporan keuangan menunjukkan bahwa terdapat faktor-faktor yang memengaruhi kualitas laporan keuangan. Faktor-faktor tersebut antara lain sebagai berikut:

1) Etika

Etika adalah sebuah ilmu yang mempelajari bagaimana berperilaku jujur, benar, dan adil. Etika merupakan cabang ilmu filsafat, mempelajari perilaku moral dan amoral, membuat pertimbangan matang yang patut dilakukan oleh seseorang kepada orang lain atau kelompok tertentu. Etika dikategorikan sebagai filsafat moral atau etika normatif. Menurut Aditya Bachtiar Rifa'i (2014) semakin tinggi etika dalam mengelola barang milik negara, maka kualitas laporan keuangan akan semakin baik. Sebaliknya, apabila etika dalam mengelola barang milik negara rendah, dapat menimbulkan Kualitas Laporan Keuangan yang kurang baik.¹⁶

¹⁵ Halkadri Fitra, *Analisis Neraca dan Laporan Realisasi Anggaran Pemerintah Daerah*, (Malang: CV IRDH, 2019), h.9-11.

¹⁶ Aditya Bachtiar Rifa'i, *"Pengaruh Etika, Kompetensi, dan Pengalaman Dalam Mengelola Barang Milik Negara Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Pusat"*, (Skripsi, Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Yogyakarta, 2014), h.79.

2) Kompetensi Sumber Daya Manusia

Kompetensi sumber daya manusia merupakan kemampuan yang dimiliki seorang pegawai yang berhubungan dengan pengetahuan, keterampilan, dan sikap dalam menyelesaikan kerjanya sehingga dapat mencapai tujuan yang diinginkan. Sumber daya manusia yang memiliki kompetensi akan dapat menyelesaikan pekerjaannya secara efisien dan efektif. Adanya kompetensi sumber daya manusia maka akan mendukung ketepatan waktu pembuatan laporan keuangan.¹⁷ Menurut Putriasri Pujanira (2017) bahwa semakin tinggi Kompetensi Sumber Daya Manusia Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan baik, maka Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang dihasilkan akan semakin baik. Sebaliknya, apabila Kompetensi Sumber Daya Manusia rendah, dapat menimbulkan Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang kurang baik.

3) Pengalaman

Pengalaman kerja adalah ukuran tentang lama waktu atau masa kerja yang telah ditempuh seseorang dapat memahami tugas-tugas suatu pekerjaan dan telah melaksanakan dengan baik. Oleh sebab itu, pengalaman pribadi pegawai dalam membuat sebuah laporan keuangan dapat dijadikan pengetahuan dan informasi. Menurut Ari Utomo (2017) dalam penelitiannya menunjukkan bahwa semakin banyak pengalaman yang dimiliki oleh pengelola keuangan dan asset daerah maka kualitas laporan keuangan daerah akan semakin baik.¹⁸

¹⁷ Putriasri Pujanira, "Pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia, Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan, Dan Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Provinsi DIY" dalam *E-Journal Akuntansi Universitas Negeri Yogyakarta*, Vol. 6.2, 2017, h.24.

¹⁸ Ari Utomo, "Pengaruh Kompetensi Dan Pengalaman Dalam Mengelola Barang Milik Daerah Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Daerah Dengan Etika Sebagai Variabel Moderating", (Skripsi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, 2017), h.69.

2. Etika

a. Pengertian Etika

Etika adalah sebuah ilmu yang mempelajari bagaimana berperilaku jujur, benar, dan adil. Etika merupakan cabang ilmu filsafat, mempelajari perilaku moral dan amoral, membuat pertimbangan matang yang patut dilakukan oleh seseorang kepada orang lain atau kelompok tertentu. Etika dikategorikan sebagai filsafat moral atau etika normatif. Etika adalah suatu perilaku normatif. etika normatif mengajarkan segala sesuatu yang sebenarnya benar menurut hukum dan benar moralitas. Ketika mengajarkan sesuatu yang salah adalah salah dan sesuatu yang benar adalah benar. sesuatu yang benar tidak dapat dikatakan salah dan sebaliknya sesuatu yang salah tidak dapat dikatakan benar. Benar dan salah tidak dapat di campur adukkan demi kepentingan seseorang atau kelompok.

Etika berasal dari kata Yunani *ethos*, bentuk jamaknya (*ta etha*) berarti "adat istiadat". Berarti etika berhubungan dengan kebaikan hidup, kebiasaan atau karakter baik terhadap seseorang, masyarakat atau terhadap sekelompok masyarakat tertentu.¹⁹ Pencapaian etika dalam usaha manusia untuk memakai akal budi dan daya fikirannya dalam pemecahan masalah setiap kehidupan, tindakan yang terbaik mengarah kepada kebenaran, kebaikan, dan ketepatan. Etika secara lebih luas tidak hanya bicara baik dan buruk tetapi lebih dari itu, yaitu bertindak secara "benar, baik, dan tepat".²⁰ Setiap individu Dalam pelaksanaan tugas profesinya harus memperhatikan etika profesi, seperti dalam pemanfaatan wewenang, menjalin koneksi, membangun karakter, dan dalam penyusunan anggaran perusahaan. Begitu pula profesi sebagai seorang pengelola aset.

Masalah etika merupakan masalah yang selalu dihadapi dalam profesi akuntansi karena akuntansi memiliki dua tuan yang harus dilayaninya, yaitu klien dan masyarakat/publik. Hal ini berkaitan dengan penyajian laporan keuangan yang wajar. (Shaub: 1993:146)

¹⁹ Saban Echdar dan Maryadi, *Business Ethics and Entrepreneurship (Etika & Kewirausahaan)*, 2019, (Yogyakarta: Deeplubish), h.1.

²⁰ Ismail Nurdin, *Etika Pemerintahan*, (Lampung Timur: Lintang Rasi Aksara Books, 2017), h.3.

Setiap manusia, siapapun dan apapun profesinya, membutuhkan perenungan-perenungan atas moralitas yang terkait dengan profesinya, begitu juga dengan profesi pengelola aset. Dalam praktiknya, profesi sebagai pengelola aset dituntut untuk harus selalu memperhatikan etika selama menjalankan tugasnya. Hal ini tentu wajar karena terkait dengan bagaimana cara mengelola barang milik negara dengan baik dan benar.

b. Etika Dalam Islam

Dalam agama Islam etika merupakan bagian dari akhlak. Hal ini dikarenakan tidak hanya berkaitan dengan perbuatan manusia secara lahiriah namun juga keterkaitannya dengan akidah, ibadah dan syariah . Etika secara bahasa adalah ilmu yang berkenaan tentang yang buruk dan tentang hak serta kewajiban moral. Etika juga bermakna nilai mengenai benar dan salah yang dianut seseorang. Etika artinya tatasusila atau tatacara pergaulan. Makna dasar dari etika adalah *ethos* (Yunani) yaitu adat kebiasaan. Sebagaimana firman Allah SWT :

وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ

Artinya : "Dan sesungguhnya kamu benar-benar berbudi pekerti yang agung".
(Surat Al-Qalam/68: 4).

Abdullah Salim berpendapat bahwa dalam Islam terdapat akhlak islami mencakup hal-hal sebagai berikut:

- 1) Etos, yang mengatur hubungan seseorang dengan khaliknya, *al ma'bud bi haq* kelengkapan *uluhiyah* dan *rubbubiyah*, seperti terhadap rasul-rasul Allah, kitab nya dan sebagainya;
- 2) kesempurnaan Etis, yang mengatur sifat seseorang terhadap dirinya dan terhadap sesamanya dalam kehidupan sehari-harinya;
- 3) Moral, yang mengatur hubungan dengan sesamanya, tetapi berlainan jenis dan atau menyangkut kehormatan tiap pribadi;

- 4) Estetika, rasa keindahan yang mendorong seseorang untuk meningkatkan keadaan dirinya serta lingkungannya, agar lebih indah dan menuju.²¹

Al Quran dan Hadist telah memberikan resep tertentu dalam tata krama demi kebaikan seorang pelaku bisnis. Seorang pelaku bisnis diwajibkan berperilaku dengan etika bisnis sesuai dengan yang dianjurkan oleh Al Quran dan Sunnah yang terangkum dalam 3 garis besar yakni²²:

- 1) Murah hati
- 2) Motivasi untuk berbakti
- 3) Ingat Allah dan Prioritas Utama-Nya

c. Indikator Etika

Indikator Etika Pengelola Aset Barang Milik Negara sebagai berikut :

- 1) Bekerja dengan penuh pengabdian dan tanggungjawab.
- 2) Berperilaku sesuai Etika.
- 3) Menjaga nama baik kepada pribadi, atasan, dan instansi.
- 4) Menjunjung tinggi moral dalam melakukan pekerjaan.

3. Kompetensi

a. Pengertian Kompetensi

Yang dimaksud dengan variabel kompetensi adalah keahlian profesional yang dimiliki oleh seorang pegawai sebagai hasil dari pendidikan formal, keikutsertaan dalam pelatihan, seminar simposium dan lain-lain. (Ida Suraida, 2005). Kompetensi adalah kemampuan pegawai dalam melaksanakan pekerjaan yang didukung oleh sikap kerja dan tanggung jawabnya secara efektif sehingga mencapai standar kualitas profesional dalam bekerja. Sikap kerja menunjukkan bahwa pegawai mampu berada di lingkungan kerja karena memiliki nilai dan karakteristik kepribadian yang sesuai dengan pekerjaan dan lingkungannya.²³

²¹ Serlika Aprita, *Etika Profesi*, (Jawa Timur: CV Penerbit Qiara Media,2020),h.2.

²² Hendra Harmain, "Persepsi Islam Dalam Etika Berbisnis Berdasarkan Al-Quran dan Hadist" Dalam Jurnal *Ekonomi & Bisnis*, Vol 8 Nomor 2 Juni 2011,h.13-28.

²³ Suparyadi, *Manajemen Sumber Daya Manusia*, h. 244

Secara etimologi, kompetensi berasal dari kata *competence* yang artinya kecakapan, kemampuan dan wewenang. Adapun secara terminologi, kompetensi diartikan sebagai dimensi perilaku keahlian atau keunggulan seorang pegawai yang mempunyai keterampilan, pengetahuan dan perilaku yang baik.²⁴

Pengertian kompetensi dalam organisasi publik maupun privat sangat diperlukan terutama untuk menjawab tuntutan organisasi, dimana adanya perubahan yang sangat cepat, perkembangan masalah yang sangat kompleks dan dinamis serta ketidakpastian masa depan dalam tatanan kehidupan masyarakat. Kompetensi adalah suatu kemampuan yang dilandasi oleh keterampilan dan pengetahuan yang didukung oleh sikap kerja serta penerapannya dalam melaksanakan tugas dan pekerjaan di tempat kerja yang mengacu pada persyaratan kerja yang ditetapkan. Menurut Peraturan Pemerintah No. 101 tahun 2000 tentang pengertian kompetensi. Kompetensi adalah kemampuan dan karakteristik yang dimiliki oleh seorang pegawai negeri sipil berupa pengetahuan, sikap perilaku yang diperlukan dalam tugas dan jabatannya.²⁵

Kompetensi para pengelola aset diukur melalui banyaknya ijazah/sertifikat yang dimiliki serta jumlah/banyaknya keikutsertaan yang bersangkutan dalam pelatihan-pelatihan, seminar atau simposium. Semakin banyak sertifikat yang dimiliki dan semakin sering mengikuti pelatihan diharapkan pengelola Aset BMN yang bersangkutan akan semakin cakap dalam melakukan tugasnya. Kecakapan dalam membuat laporan keuangan BMN dan kemampuan untuk mengetahui kekeliruan merupakan salah satu bagian dari kompetensi seorang pembuat laporan keuangan.

b. Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Kompetensi

Ada beberapa faktor yang dapat mempengaruhi kompetensi, yaitu:

1) Keyakinan dan Nilai-nilai

Keyakinan orang tentang dirinya maupun terhadap orang lain akan memengaruhi perilaku. Apabila orang percaya bahwa mereka mampu dalam melakukan sesuatu dan dikerjakan dengan mudah.

²⁴ Edy Sutrisno, *Manajemen Sumber Daya Manusia*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2009), h. 202.

²⁵ *Ibid*, h. 203.

2) Keterampilan

Keterampilan memainkan peran penting dalam kompetensi, seperti berbicara di depan umum. Dengan keterampilan berbicara, kecakapannya dalam kompetensi tentang perhatian terhadap komunikasi akan meningkat.

3) Pengalaman

Pengalaman adalah elemen kompetensi yang perlu. Orang yang pekerjaannya memerlukan sedikit pemikiran strategis kurang mengembangkan kompetensi daripada mereka yang menggunakan pemikiran strategis bertahun-tahun.

4) Karakteristik Kepribadian

Kepribadian seseorang dapat berubah sepanjang waktu dengan merespon dan berinteraksi dengan kekuatan dan lingkungannya.

5) Motivasi

Apabila manajer dapat mendorong motivasi pribadi seorang pekerja, kemudian menyelaraskan dengan kebutuhan bisnis, maka akan menemukan peningkatan akan penguasaan dalam sejumlah kompetensi yang memengaruhi kinerja.

6) Isu Emosional

Kondisi emosional seseorang berpengaruh dalam penampilan kerjanya. Rasa percaya diri membuat orang dapat melakukan suatu pekerjaan dengan lebih baik. Gangguan emosional seperti rasa takut dan malu dapat menurunkan penampilan kerja.

7) Kemampuan Intelektual

Kompetensi tergantung pada pemikiran kognitif seperti pemikiran konseptual dan pemikiran analitis. Memperbaiki melalui setiap intervensi yang diwujudkan suatu organisasi.

8) Budaya Organisasi

Budaya organisasi berpengaruh pada kompetensi seseorang dalam berbagai kegiatan, karena budaya organisasi mempengaruhi kinerja, hubungan

antar pegawai, dan motivasi kerja yang akan berpengaruh pada kompetensi orang tersebut.²⁶

c. Kompetensi Perspektif Islam

Dalam Islam setiap pekerjaan harus dilakukan secara professional, dalam artian harus dilakukan secara baik dan benar. Hal tersebut hanya mungkin dilakukan oleh orang yang telah ahli. Sebagaimana sabda Rosulullah yang artinya : bila suatu urusan dikerjakan oleh orang yang tidak ahli, maka tunggulah kehancuran.

Hadist tersebut mengandung pengertian bahwa perlunya ketepatan seseorang dalam bidangnya sesuai keahliannya. Seperti dijelaskan dalam surat Al-An'am ayat 135.²⁷

قُلْ يَوْمَ نَعْمَلُ الْبَشَرَ خِزْفًا ثُمَّ نَقْدِمُ الْعِزَّةَ عَلَى الْكَافِرِينَ إِنَّهُمْ لَا يَأْمُرُونَ بِالْعَمَلِ الصَّالِحِ فِي الْغَايَةِ إِنَّهُمْ لَأَبْغَاءُ وَمَنْ يَأْمُرْ بِالْعَمَلِ الصَّالِحِ فِي الْغَايَةِ فَإِنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ وَلَٰكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ

Artinya: “Katakanlah! Hai kaumku, beramallah sepenuh kemampuanmu dalam bidangmu masing-masing, akupun beramal pula dalam bidangku. Kelak kamu akan mengetahui siapakah di antara kita yang akan memperoleh hasil baik di akhirat dari amal kita itu. Sungguh orang-orang dzalim tidak akan mendapat kemenangan”. (Al-An'am: 135).

Ayat tersebut menjelaskan bahwa Allah memberikan balasan terhadap apa yang diperbuat oleh umatnya. bekerjalah sesuai kemampuan masing-masing jangan asal bekerja saja, tetapi bekerja dengan sungguh-sungguh, dengan sepenuh hati. Untuk mencapai kinerja yang baik , maka tiap pegawai haruslah mempunyai kompetensi yang baik pula.

d. Indikator Kompetensi

- 1) Pengetahuan (*knowledge*), yaitu kesadaran dalam bidang kognitif. Misalnya, seorang karyawan mengetahui cara melakukan identifikasi belajar, dan bagaimana melakukan pembelajaran yang baik sesuai dengan kebutuhan yang ada di perusahaan.

²⁶ Wibowo, *Manajemen Kinerja*, (Jakarta: Rajawali Pers, Ed. 5, Cet. 11, 2016), h. 283.

²⁷ Departemen Agama RI, *Al-qur'an dan Terjemahan*, (Surabaya: Pustaka agung, 2006), h. 195.

- 2) Pemahaman (*understanding*), yaitu kedalaman kognitif, dan efektif yang dimiliki oleh individu. Misalnya, seorang karyawan dalam melaksanakan pembelajaran harus mempunyai pemahaman yang baik tentang karakteristik dan kondisi secara efektif dan efisien.
- 3) Kemampuan (*skill*), yaitu sesuatu yang dimiliki oleh individu untuk melaksanakan tugas atau pekerjaan yang dibebankan kepadanya. Misalnya, kemampuan karyawan dalam memilih metode kerja yang dianggap lebih efektif dan efisien.
- 4) Nilai (*value*), adalah suatu standar perilaku yang telah diyakini dan secara psikologi telah menyatu dalam diri seseorang. Misalnya, standar perilaku para karyawan dalam melaksanakan tugas (kejujuran keterbukaan, demokratis, dan lain-lain).
- 5) Sikap (*attitude*), yaitu perasaan (senang-tidak senang, suka-tidak suka) atau reaksi terhadap suatu rangsangan yang datang dari luar. Misalnya, reaksi terhadap krisis ekonomi, perasaan terhadap kenaikan gaji, dan sebagainya.
- 6) Minat (*interest*), adalah kecenderungan seseorang untuk melakukan suatu perbuatan. Misalnya, melakukan suatu aktifitas kerja.²⁸

4. Pengalaman

a. Pengertian Pengalaman

Menurut Robbins (2003): Pengalaman dapat diperoleh secara langsung melalui pengamatan atau latihan, atau dapat diperoleh secara tidak langsung, seperti melalui membaca. Berdasarkan pengertian dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia menyebutkan bahwa pengalaman kerja adalah suatu kegiatan atau

²⁸ Edy sutrisno, *Manajemen Sumber Daya Manusia*, (Jakarta: Prenada Media group,2009), h. 204-205.

proses yang pernah dialami oleh seseorang ketika mencari nafkah untuk memenuhi kebutuhan hidupnya²⁹

Pengalaman kerja dapat meningkatkan keterampilan dalam bekerja, karena dengan pekerjaan yang dilakukannya secara berulang-ulang tentunya dapat menambah pengetahuan dan mendapatkan cara yang terbaik, efektif dan efisien dalam menjalankan tugasnya, selain itu seseorang yang memiliki pengalaman tentunya memiliki cara berfikir yang lebih terperinci dan lengkap jika dibanding dengan seseorang yang belum memiliki pengalaman. Pengalaman dalam mengelola aset akan semakin berkembang dengan bertambahnya pengalaman, diskusi mengenai pengelolaan BMN dengan rekan sekerja, pengawasan dan review oleh inspektorat, mengikuti program pelatihan dan pedoman pengelolaan BMN.

b. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Pengalaman Kerja

Mengingat pentingnya pengalaman kerja dan sangat berpengaruh terhadap kinerja suatu karyawan dalam suatu perusahaan maka diperkirakan juga tentang faktor-faktor yang mempengaruhi pengalaman kerja. Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi pengalaman kerja seseorang adalah waktu, frekuensi, jenis, tugas, penerapan, dan hasil. Dapat dijelaskan sebagai berikut:

- 1) Waktu Semakin lama seseorang melakukan tugas akan memperoleh pengalaman bekerja yang lebih banyak.
- 2) Frekuensi Semakin banyak melaksanakan tugas sejenis umumnya orang-orang tersebut akan memperoleh pengalaman kerja yang lebih baik.
- 3) Jenis tugas Semakin banyak jenis tugas yang dilaksanakan oleh seseorang maka umumnya orang tersebut akan memperoleh pengalaman kerja yang lebih banyak.
- 4) Penerapan Semakin banyak penerapan pengetahuan, ketrampilan dan sikap seseorang dalam melaksanakan tugasnya tentunya akan dapat meningkatkan pengalaman kerja orang tersebut.

²⁹ Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI)*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2008), h.87.

- 5) Hasil Seseorang yang memiliki pengalaman kerja lebih banyak akan dapat memperoleh hasil pelaksanaan tugas yang lebih baik.³⁰

c. Pengalaman dalam Pandangan Islam

Dalam Ekonomi Islam, pengalaman kerja merupakan hal yang sangat penting dalam dunia kerja. Konsep ini telah jauh dikenal dalam Islam seperti yang tercantum dalam Q.S At-Taubah ayat 105, Allah SWT. berfirman:

وَقُلِ اعْمَلُوا فَسَيَرَى اللَّهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ وَالْمُؤْمِنُونَ وَسَتُرَدُّونَ إِلَىٰ عِلْمِ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ
فَيُنَبِّئُكُم بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ

Artinya: dan katakanlah: “Bekerjalah kamu, maka Allah dan rasul-nya serta orang-orang mukmin akan melihat pekerjaanmu itu, dan kamu akan dikembalikan kepada (Allah) yang mengetahui akan yang ghaib dan yang nyata, lalu diberitakan-nya kepada kamu apa yang telah kamu kerjakan.”³¹

Terma “kerja” pada ayat diatas diungkap lewat kata 'amal. Para mufasir memahami kata 'amal pada ayat tersebut mengacu pada arti amal-amal saleh. Bahkan ada kesan, kata mal dipahami sebagai ibadah. M. Quraish Shihab menuliskan bahwa setelah ayat yang lalu menganjurkan bertaubat dan melakukan kegiatan nyata, antara lain membayar zakat dan bersedekah, kini mereka diminta untuk melakukan aneka aktivitas lain, baik yang nyata maupun yang tersembunyi.

Ayat ini sesungguhnya bertujuan agar manusia mawas diri dan mengawasi amal-amal mereka, dengan jalan mengingatkan mereka bahwa setiap amal yang baik dan yang buruk, memiliki hakikat yang tidak dapat disembunyikan, dan mempunyai saksi-saksi yang mengetahui dan melihat hakikatnya, yaitu rasul dan para saksi amal-amal dari kelompok kaum mukmin, tentu saja setelah disaksikan Allah SWT.

³⁰ Ahmadi, Djauzak, *Peningkatan Mutu Pendidikan Sebagai Sarana Pembangunan Bangsa*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2004), h. 57.

³¹ Azhari Akmal Tarigan, *Tafsir Ayat-Ayat Ekonomi*, (Medan: Citapustaka Media Printis, 2014), h.134-135.

d. Indikator Pengalaman Kerja

Indikator pegalaman kerja yang juga menentukan berpengalaman tidaknya seorang karyawan yaitu:

- 1) Lama Bekerja.
- 2) Kompleksitas masalah/persoalan.
- 3) Kontinyuitas pekerjaan.
- 4) Jumlah Pekerjaan yang dikerjakan.

5. Pengelolaan Barang Milik Negara

Dalam peraturan pemerintah nomor 6 tahun 2006 tentang pengelolaan barang milik Negara (BMN) disebutkan bahwa pengelolaan BMN adalah kegiatan yang dilakukan atas BMN mulai dari perencanaan sampai dengan penghapusan yang meliputi 10 (sepuluh) kegiatan sebagai berikut :

a. Perencanaan kebutuhan dan penganggaran

Perencanaan kebutuhan adalah kegiatan merumuskan rincian kebutuhan BMN untuk menghubungkan pengadaan barang yang telah lalu dengan yang sedang berjalan sebagai dasar dalam melakukan tindakan yang akan datang.

b. Pengadaan

Perencanaan anggaran yang mencerminkan kebutuhan riil BMN pada kementerian/ lembaga/ satuan kerja perangkat daerah selanjutnya menentukan pencapaian tujuan pengadaan barang yang diperlukan dalam rangka penyelenggaraan tugas pokok, dan fungsi pemerintahan.

c. Penggunaan

Penggunaan adalah kegiatan yang dilakukan oleh pengguna barang dalam mengelola dan menatausahakan BMN yang sesuai dengan tugas pokok dan fungsi instansi yang bersangkutan.

d. Pemanfaatan

Pemanfaatan adalah pendayagunaan BMN yang tidak dipergunakan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi kementerian / lembaga/satuan kerja perangkat daerah, dalam bentuk sewa, pinjam pakai, kerjasama pemanfaatan, dan

bangun serah guna/bangun guna serah dengan tidak mengubah status kepemilikan.

e. Pengamanan dan pemeliharaan

Pengamanan administratif yang ditunjang oleh pengamanan fisik dan pengamanan hukum atas BMN merupakan bagian penting dari pengelolaan BMN. Sedangkan yang dimaksud dengan pemeliharaan adalah suatu rangkaian untuk menjaga kondisi dan memperbaiki semua BMN agar selalu dalam keadaan baik, dan siap untuk digunakan secara berdaya guna dan berhasil guna.

f. Penilaian

Penilaian adalah suatu proses kegiatan penelitian yang selektif didasarkan pada data/ fakta yang objektif dan relevan dengan menggunakan metode/teknik tertentu untuk memperoleh nilai barang milik Negara.

g. Penghapusan

Penghapusan adalah tindakan menghapus BMN dari daftar barang dengan menerbitkan surat keputusan dari pejabat yang berwenang untuk membebaskan pengguna dan /kuasa pengguna barang dan / atau pengelola barang dari tanggung jawab administrasi dan fisik atas barang yang berada dalam penguasaannya.

h. Pemindahtanganan

Pemindahtanganan adalah pengalihan kepemilikan barang milik Negara sebagai tindak lanjut dari penghapusan dengan cara dijual, dipertukarkan, dihibahkan atau disertakan sebagai modal pemerintah.

i. Penatausahaan

Adalah rangkaian kegiatan yang meliputi pembukuan, inventarisasi, dan pelaporan BMN sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

j. Pembinaan, pengawasan dan pengendalian

Menteri Keuangan menetapkan kebijakan umum dan kebijakan teknis pengelolaan BMN. Sedangkan Menteri Dalam Negeri menetapkan kebijakan teknis dan melakukan pembinaan pengelolaan BMN sesuai dengan kebijakan sebagaimana yang telah ditetapkan dalam kebijakan umum.

B. Penelitian Sebelumnya

Beberapa penelitian dengan topik yang hampir sama telah dilakukan oleh peneliti-peneliti sebelumnya.

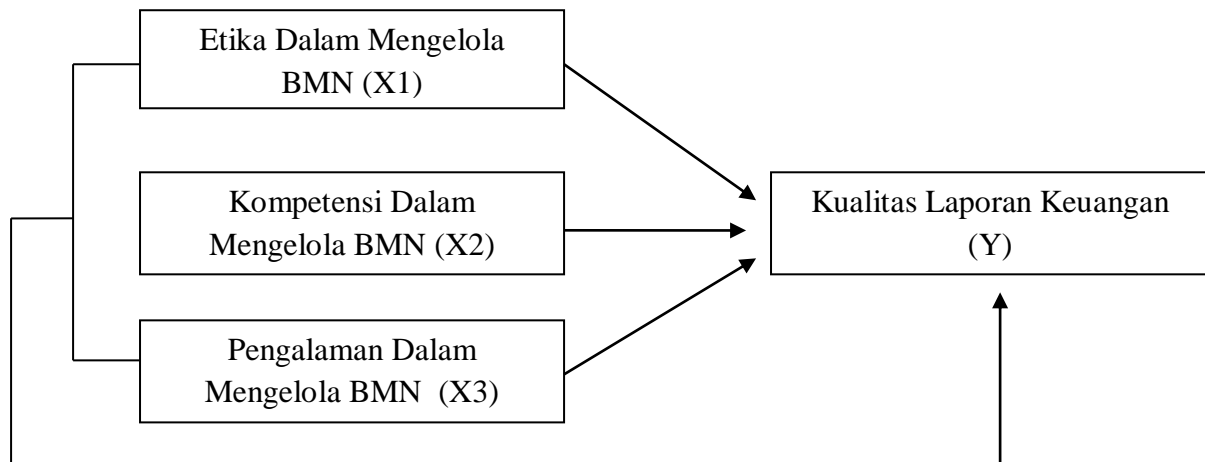
Tabel 2.1
Penelitian Sebelumnya

No	Nama Peneliti	Judul Penelitian	Variabel	Hasil Penelitian
1.	Nurul Khadijah Harahap (2018)	Pengaruh Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah, Kompetensi Sumber Daya Manusia, Dan Pengendalian Internal, Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	Variabel independen: - sistem akuntansi keuangan daerah -kompetensi sumber daya manusia - pengendalian internal Variabel dependen: - kualitas laporan keuangan	Sistem akuntansi keuangan daerah, kompetensi sumber daya manusia, pengendalian internal berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan
2.	Mutia Aulia Safridha (2019)	Pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia, Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah Dan Sistem Pengendalian Internal Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	Variabel independen: - kompetensi sumber daya manusia - penerapan standar akuntansi pemerintah - sistem pengendalian internal Variabel dependen: - kualitas laporan keuangan	kompetensi sumber daya manusia, penerapan standar akuntansi pemerintah dan sistem pengendalian internal berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan
3.	Putriasri Pujanira (2017)	Pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia,	Variabel independen: - kompetensi	Kompetensi sumber daya manusia,

		Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah, Dan Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	<p>sumber daya manusia</p> <ul style="list-style-type: none"> - penerapan standar akuntansi pemerintah - penerapan sistem akuntansi keuangan daerah <p>Variabel dependen:</p> <ul style="list-style-type: none"> - kualitas laporan keuangan 	penerapan standar akuntansi pemerintah, dan penerapan sistem akuntansi keuangan daerah berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan
4.	Aditya Bachtiar Rifa'i (2014)	Pengaruh Etika, Kompetensi, Dan Pengalaman Dalam Mengelola Barang Milik Negara Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Pusat	<p>Variabel independen:</p> <ul style="list-style-type: none"> - etika - kompetensi - pengalaman <p>Variabel dependen:</p> <ul style="list-style-type: none"> - kualitas laporan keuangan 	Terdapat pengaruh etika, kompetensi, dan pengalaman dalam mengelola barang milik negara terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah pusat.
5.	Ari Utomo (2017)	Pengaruh Kompetensi Dan Pengalaman Dalam Mengelola Barang Milik Daerah Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Daerah Dengan Etika Sebagai Variabel Moderating	<p>Variabel independen:</p> <ul style="list-style-type: none"> - kompetensi - pengalaman <p>Variabel moderating:</p> <ul style="list-style-type: none"> - etika <p>Variabel dependen:</p> <ul style="list-style-type: none"> - kualitas laporan keuangan 	Kompetensi, pengalaman berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan daerah, interaksi etika dan kompetensi berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan daerah, interaksi etika dan pengalaman berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan daerah

C. Kerangka Teoritis

Berdasarkan penjelasan yang telah disampaikan sebelumnya, maka kerangka pemikiran dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:



Gambar 2.1
Kerangka Teoritis

Keterangan :

X1 : Variabel bebas 1, yaitu Etika dalam mengelola BMN

X2 : Variabel bebas 2, yaitu Kompetensi dalam mengelola BMN

X3 : Variabel bebas 3, yaitu Pengalaman dalam mengelola BMN

Y : Variabel terikat, yaitu Kualitas Laporan Keuangan

D. Hipotesis

Hipotesis berasal dari kata yaitu hypo (belum tentu benar) dan tesis (kesimpulan). Hipotesis sebagai hubungan yang diperkirakan secara logis di antara dua atau lebih variabel yang diungkap dalam bentuk pernyataan yang dapat diuji. Hipotesis merupakan jawaban sementara atas pernyataan penelitian.

Hipotesis penelitian ini adalah:

Ha₁ : Etika dalam mengelola barang milik negara berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan BKKBN Provinsi Sumatera Utara

H₀₁ : Etika dalam mengelola barang milik negara tidak berpengaruh

- terhadap kualitas laporan keuangan BKKBN Provinsi Sumatera Utara
- Ha₂ : Kompetensi dalam mengelola barang milik negara berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan BKKBN Provinsi Sumatera Utara
- H0₂ : Kompetensi dalam mengelola barang milik negara tidak berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan BKKBN Provinsi Sumatera Utara
- Ha₃ : Pengalaman dalam mengelola barang milik negara berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan BKKBN Provinsi Sumatera Utara
- H0₃ : Pengalaman dalam mengelola barang milik negara tidak berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan BKKBN Provinsi Sumatera Utara
- Ha₄ : Etika, Kompetensi dan Pengalaman dalam mengelola barang milik negara secara simultan berpengaruh terhadap laporan keuangan BKKBN Provinsi Sumatera Utara
- H0₄ : Etika, Kompetensi dan Pengalaman dalam mengelola barang milik negara secara simultan tidak berpengaruh terhadap laporan keuangan BKKBN Provinsi Sumatera Utara

BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

A. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan asosiatif kausalitas yaitu hubungan timbal balik antara dua variabel atau lebih atau menjelaskan hubungan independen terhadap variabel dependen dalam arti yang saling menguatkan dengan jenis kuantitatif. Desain Kausal berguna untuk mengukur hubungan hubungan antara variable riset atau berguna untuk menganalisis bagaimana suatu variabel mempengaruhi variabel lainnya yaitu hubungan sebab akibat.³²

B. Lokasi dan Waktu Penelitian

A. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian ini dilakukan di kantor BKKBN Provinsi Sumatera Utara yang berada di Jl. Gunung Krakatau No. 110, Pulo Brayon Darat II, Kec. Medan Tiimur, Kota Medan, Sumatera Utara.

B. Waktu Penelitian

Adapun waktu penelitian ini dilakukan pada bulan Maret 2021 sampai dengan selesai.

C. Populasi dan Sampel

1. Populasi

Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri dari sekelompok orang, kejadian atau segala sesuatu yang mempunyai karakteristik tertentu. Populasi juga merupakan kumpulan-kumpulan elemen yang berkaitan dengan apa yang peneliti harapkan dalam mengambil kesimpulan.³³ Berdasarkan pengertian populasi tersebut maka yang menjadi populasi dalam penelitian ini adalah seluruh Pegawai Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Provinsi Sumatera Utara berjumlah 88 pegawai.

³² Arfan Ikhsan, dkk, *Metodologi Penelitian Bisnis*, (Medan : Cita Pustaka, 2014).h. 86

³³ Ibid., h. 105

2. Sampel

Sampel merupakan bagian dari populasi yang menjadi wakil dari populasi tersebut. Sampel dalam penelitian ini ditentukan dengan teknik purposive sampling. Purposive sampling adalah cara menentukan sampel dengan criteria tertentu (Sugiyono, 2013). Kriteria tersebut adalah pegawai negeri sipil pada Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Provinsi Sumatera Utara yang memiliki pengalaman minimal 1 tahun dan mempunyai tupoksi sebagai Pengelola Aset. Alasan dipilih mempunyai pengalaman kerja satu tahun karena telah memiliki waktu dan pengalaman untuk beradaptasi serta menilai kondisi lingkungan kerjanya. Yang menjadi kriteria dalam pemilihan sampel tersebut dimana pengelola aset yang mempunyai pengalaman minimal 1 tahun yaitu berjumlah 17 orang.

Tabel 3.1

**Jumlah Pegawai Yang Terlibat Dalam Pengelola BMN & Laporan
Keuangan BKKBN Provinsi Sumatera Utara**

No	Jabatan	Jumlah Pegawai
1.	Analisis Keuangan dan Barang Milik Negara	3
2.	Pengelola Barang Milik Negara	5
3.	Bendahara BMN & Laporan Keuangan	4
4.	Pranata Komputer Ahli BMN & Laporan Keuangan	2
	Penyusun Bahan Keuangan dan BMN	3
Total		17

Sumber: BKKBN Provinsi Sumatera Utara

D. Data Penelitian

Jenis data pada penelitian ini yaitu jenis kuantitatif. Sumber data pada penelitian ini adalah data primer. Data Primer adalah data yang diperoleh secara langsung dari sumber asli atau pihak pertama. Dalam penelitian ini data primer berasal dari staff Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Provinsi Sumatera Utara.

E. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling strategis dalam penelitian, karena tujuan utama dari penelitian adalah mendapatkan data. Prosedur pengumpulan data dapat juga diartikan sebagai suatu usaha untuk mengumpulkan data. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini dengan metode kuisisioner, yaitu teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara memberikan tanggungjawab kepada responden untuk membaca dan menjawab pertanyaan.³⁴ Dalam penelitian ini kuisisioner yang akan dibuat merupakan kuisisioner yang dimodifikasi dari peneliti sebelumnya yaitu Aditya Bachtiar Rifai, 2014.

Daftar pertanyaan yang digunakan dalam pertanyaan terstruktur dan responden tinggal memberi tanda checklist pada jawaban yang dipilih. Kemudian responden langsung mengembalikan daftar pertanyaan setelah diisi. Masingmasing variable diukur dengan model skala likert, dengan skala likert, maka variable yang akan diukur akan dijabarkan menjadi indikator variable, alternatif jawaban pada setiap pernyataan adalah sebagai berikut.

Tabel 3.2
Skala Likert

Nomor	Keterangan	Skor/Bobot
1	Sangat Setuju (SS)	5
2	Setuju (S)	4
3	Netral (N)	3
4	Tidak Setuju (TS)	2
5	Sangat Tidak Setuju (STS)	1

³⁴ Ibid., h. 124.

F. Definisi Operasional

Definisi operasional variabel menjelaskan definisi yang dinyatakan dalam bentuk istilah yang diuji secara spesifik dengan pengukuran kriteria.

Penelitian ini terdiri dari satu variabel dependen dan tiga variabel independen.

1. Kualitas Laporan Keuangan (Y), Laporan Keuangan merupakan ringkasan dari suatu proses pencatatan, suatu ringkasan dari transaksi keuangan yang terjadi selamasatu tahun buku yang bersangkutan.
2. Etika (X1), merupakan nilai-nilai tingkah laku atau aturan tingkah laku yang diterima dan digunakan oleh suatu golongan tertentu.
3. Kompetensi (X2), adalah keahlian professional yang dimiliki oleh pengelola BMN sebagai hasil dari pendidikan formal maupun keikutsertaan dalam pelatihan-pelatihan, symposium dan seminar.
4. Pengalaman (X3), adalah pengetahuan atau keterampilan yang telah diketahui dan dikuasai seseorang yang akibat dari perbuatan atau pekerjaan yang telah dilakukan selama beberapa waktu tertentu.

Variabel ini diukur menggunakan instrumen kuesioner dengan skala likert 1 sampai 5, di mana responden diminta pendapatnya dari setiap pernyataan mulai dari tidak setuju sampai sangat setuju, dan dijelaskan sebagai berikut:

Tabel 3.3

Definisi Operasional Variabel

Variabel	Indikator	Skala
1. Etika (X1) merupakan nilai-nilai tingkah laku atau aturan tingkah laku yang diterima dan digunakan oleh suatu golongan tertentu.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Bekerja dengan penuh pengabdian dan tanggungjawab. 2. Berperilaku sesuai kode Etik 3. Menjaga nama baik kepada pribadi, atasan, dan instansi. 4. Menjunjung tinggi moral dalam melakukan pekerjaan 	Skala likert

2. Kompetensi (X2) merupakan keahlian professional yang dimiliki oleh pengelola BMN sebagai hasil dari pendidikan formal maupun keikutsertaan dalam pelatihan-pelatihan, symposium dan seminar.	1. Pengetahuan (<i>knowledge</i>) 2. Pemahaman (<i>understanding</i>) 3. Kemampuan (<i>skill</i>) 4. Nilai (<i>value</i>) 5. Sikap (<i>attitude</i>) 6. Minat (<i>interest</i>)	Skala <i>likert</i>
3. Pengalaman (X3) merupakan pengetahuan atau keterampilan yang telah diketahui dan dikuasai seseorang yang akibat dari perbuatan atau pekerjaan yang telah dilakukanselama beberapa waktu tertentu.	1. Lama Bekerja. 2. Kompleksitas masalah/persoalan. 3. Kontinuitas pekerjaan. 4. Jumlah Pekerjaan yang dikerjakan.	Skala <i>likert</i>
4. Kualitas Laporan Keuangan (Y) merupakan ringkasan dari suatu proses pencatatan, suatu ringkasan dari transaksi keuangan yang terjadi selamasatu tahun buku yang bersangkutan.	1. Relevan 2. Andal 3. Dapat dibandingkan 4. Dapat dipahami	Skala <i>likert</i>

G. Teknik Analisis Data

Teknik Analisis data merupakan salah satu bagian dari proses penelitian. Analisis data berarti menginterpretasikan data-data yang telah dikumpul dari lapangan dan telah diolah sehingga menghasilkan informasi tertentu.³⁵

Untuk mengadakan pengujian terhadap hipotesis ini dan menjawab rumusan masalah yang dikemukakan sebelumnya, maka penulis menggunakan analisis data. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu:

³⁵ Budi Trianto, *Riset Modeling Teori, Konsep dan Prosedur Melakukan Penelitian Serta Aplikasi Pengelolaan Data Penelitian dengan Program SPSS dan LISREL*, (Pekan Baru: AdhDhuha Institute, 2016), h.29.

1. Statistik Deskriptif

Statistik deskriptif memberikan gambaran atau deskripsi suatu data yang dilihat dari nilai rata-rata (*mean*), standar deviasi, varian maksimum, minimum, sum, range, kurtosis, dan skewness (kemencengan distribusi). Statistik deskriptif lebih berhubungan dengan pengumpulan dan peringkasan data, serta panyajian hasil peringkasan tersebut.

2. Uji Kualitas Data

a. Uji Validitas

Uji validitas adalah akurasi temuan peneliti yang mencerminkan kebenaran sekaligus responden yang dijadikan objek penguji berbeda, Uji Validitas digunakan untuk untuk mengetahui apakah kuesioner yang digunakan valid atau sah. Validitas dalam peneltian ditentukan oleh proses pengukuran yang akurat. Suatu instrumen pengukur dikatakan valid jika instrument tersebut mengukur apa yang seharusnya diukur.³⁶

Kriteria pengujian validitas adalah sebagai berikut:

- 1) Jika r hitung positif dan r hitung $>$ r table maka butir pertanyaan tersebut valid
- 2) Jika r hitung negatif dan r hitung $<$ r table maka butir pertanyaan tersebut tidak valid.

b. Uji Reliabilitas

Uji reliabilitas digunakan untuk mengetahui konsistensi alat ukur, apakah alat pengukur yang digunakan dapat diandalkan dan tetap konsisten jika pengukurang tersebt diulang. Adapun cara yang digunakan untuk menguji reliabilitas kuesioner dalam penelitain ini adalah menggunakan rumus koefisien *Alpha Cronbach*. Variabel dinyatakan reliabel jika memiliki nilai *Alpha Cronbach* minimal sebesar 0,6.

³⁶ Arfan Ikhsan,dkk, *Metodologi Penelitian Bisnis*, (Medan:CitaPustaka,2014).h. 158.

3. Uji Asumsi Klasik

Uji asumsi klasik adalah untuk mengetahui apakah model liner berganda telah memenuhi persyaratan, Uji asumsi klasik terdiri dari: uji normalitas, multikolinieritas, dan heterokedasititas.

a. Uji Normalitas

Uji normalitas data bertujuan untuk mengetahui apakah distribusi sebuah data mengikuti atau mendekati distribusi normal. Uji normalitas ini memiliki dua cara untuk menguji apakah distribusi normal atau tidak, yaitu melalui pendekatan histogram dan pendekatan grafik. Pada pendekatan histogram data berdistribusi normal apabila distribusi data tersebut tidak melenceng kekiri atau melenceng kekanan. Pada pendekatan grafik data berdistribusi normal apabila titik mengikuti data di sepanjang garis diagonal.

Cara lain adalah dengan uji statistik *one-simple kolmogorov-smirnov*. Dasar pengambilan keputusan dari *one-simple kolmogorov-smirnov* adalah:

- 1) Jika hasil *one-simple kolmogorov-smirnov* di atas tingkat signifikansi 0,05 menunjukkan pola distribusi normal, maka model regresi tersebut memenuhi asumsi normalitas.
- 2) Jika hasil *one-simple kolmogorov-smirnov* di bawah tingkat signifikansi 0,05 tidak menunjukkan pola distribusi normal, maka model regresi tersebut tidak memenuhi asumsi normalitas.

b. Uji Multikolinieritas

Uji multikolinearitas bertujuan untuk menguji apakah model regresi ditemukan adanya korelasi antar variabel bebas (independen). Model regresi yang baik seharusnya tidak terjadi korelasi di antara variabel independen. Jika variabel independen saling berkorelasi, maka variabel – variabel ini tidak ortogonal. Variabel ortogonal adalah variabel independen yang nilai korelasi antar sesama variabel independen sama dengan nol. Salah satu cara mengetahui ada tidaknya multikolinearitas pada suatu model regresi adalah dengan melihat nilai tolerance dan VIF (*Variance Inflation Factor*).

- 1) Jika nilai tolerance $> 0,10$ dan VIF $< 10,00$ maka dapat diartikan bahwa tidak terdapat multikolinearitas pada penelitian tersebut.

- 2) Jika nilai tolerance 10,00 maka terjadi gangguan multikolinearitas pada penelitian tersebut.

c. Uji Heteroskedastisitas

Uji heteroskedastisitas bertujuan menguji apakah dalam model regresi terjadi ketidaksamaan varian dari residual satu pengamatan ke pengamatan lain. Jika varian dari residual satu pengamatan lain tetap, maka disebut homoskedastisitas dan jika berbeda disebut heteroskedastisitas.³⁷ Untuk mengetahui adanya heteroskedastisitas adalah dengan melihat ada atau tidaknya pola tertentu pada grafik *Scatter Plot* dengan keuntungan :

- 1) Jika ada data yang membentuk pola tertentu, seperti titik-titik yang membentuk pola tertentu dan teratur (bergelombang, melebar kemudian menyemping) maka telah terjadi heteroskedastisitas.
- 2) Jika tidak ada pola yang jelas serta titik-titik menyebar di atas dan di bawah angka 0 maka tidak terjadi heteroskedastisitas.

Adapun cara lain yang lebih akurat untuk mendeteksi heteroskedastisitas yaitu dengan cara Uji Glejser. Uji Glejser ini dilakukan dengan cara meregresikan variabel independen dengan nilai absolute residualnya.

4. Uji Hipotesis Penelitian

a. Uji Koefisien Determinasi (R²)

R² pada intinya mengukur seberapa jauh kemampuan model dalam menerangkan variasi variabel dependen. Nilai koefisien determinasi adalah R² yang kecil berarti kemampuan variabel-variabel independen dalam menjelaskan variasi variabel dependen amat terbatas. Nilai yang mendekati satu berarti variabel-variabel independen memberikan hampir semua informasi yang dibutuhkan untuk memprediksi variasi variabel dependen.

³⁷ Arfan Ikhsan, dkk, *Metodologi Penelitian Bisnis*, (Medan:CitaPustaka,2014).h. 183.

b. Uji Parsial (t-test)

Uji Parsial t disebut juga sebagai uji signifikan individual. Uji ini digunakan untuk menguji seberapa jauh pengaruh satu variabel independen secara individual dalam menerangkan variasi variabel dependen. Kriteria yang digunakan dalam menerima atau menolak hipotesis adalah :

- 1) H diterima atau H₀ ditolak apabila $t_{hitung} > t_{tabel}$, dan nilai probabilitas < sebesar 0,05.
- 2) H ditolak atau H₀ diterima apabila $t_{hitung} < t_{tabel}$, dan nilai probabilitas > sebesar 0,05

Rumus t_{tabel} : (Sahid Raharjo, 2018)

$$t_{tabel} = t (\alpha/2 ; n-k-1)$$

Keterangan:

α = tingkat kepercayaan (0,05)

n = jumlah sampel

k = jumlah variabel X

Setelah diperoleh hasil hitungan t_{tabel} , kemudian lihat didistribusi nilai tabel t. Pengujian hipotesis dapat menggunakan t_{hitung} dengan t_{tabel} maupun hasil analisis menggunakan SPSS dengan tingkat kepercayaan.

c. Uji F (F test)

Uji F dilakukan untuk menunjukkan apakah semua variabel independen atau bebas yang dimasukkan dalam model regresi berganda mempunyai pengaruh secara bersama-sama terhadap variabel dependen. Kriteria yang digunakan dalam menerima atau menolak hipotesisi adalah:

- 1) H diterima atau H₀ ditolak apabila $F_{hitung} > F_{tabel}$, dan nilai probabilitas < sebesar 0,05.
- 2) H ditolak atau H₀ diterima apabila $F_{hitung} < F_{tabel}$, dan nilai probabilitas > sebesar 0,05

Rumus F_{tabel} : (Sahid Raharjo,2018)

$$F_{tabel} = F (k ; n-k)$$

Keterangan:

n = jumlah sampel

k = jumlah variabel X

Setelah diperoleh hasil hitungan F tabel, kemudian lihat didistribusi nilai tabel F. Pengujian hipotesis dapat menggunakan F_{hitung} dengan F_{tabel} maupun hasil analisis menggunakan SPSS dengan tingkat kepercayaan.

I. Regresi Linear Berganda

Model penelitian ini menggunakan model regresi linear berganda. Model regresi linear berganda adalah model regresi yang memiliki lebih dari satu variabel independen. Metode regresi linear berganda berguna bagi para pengguna alat untuk dapat melihat variabel yang bersifat kausal. Model regresi linear berganda dikatakan model yang baik jika model tersebut memiliki asumsi normalitas data dan terbebas dari asumsi-asumsi klasik statistik baik multikolinieritas, autokorelasi dan heterokedasitas.³⁸

Model analisis linear berganda dalam pernyataan ini dinyatakan sebagai:

$$Y = \alpha + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + \beta_3 X_3 + e$$

Y = Kualitas laporan keuangan

α = Konstanta

β_1 = Koefisien regresi etika (X1)

β_2 = Koefisien regresi kompetensi (X2)

β_3 = Koefisien regresi pengalaman (X3)

X₁ = Variabel etika

X₂ = Variabel kompetensi

X₃ = Variabel pengalaman

e = Standart Error

³⁸ Muhammad Teguh, *Metode Kuantitatif untuk Analisis Ekonomi dan Bisnis*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2014), h. 103.

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian

1. Sejarah BKKBN Provinsi Sumatera Utara

Organisasi keluarga berencana dimulai dari pembentukan Perkumpulan Keluarga Berencana pada tanggal 23 Desember 1957 di gedung Ikatan Dokter Indonesia. Nama perkumpulan itu sendiri berkembang menjadi Perkumpulan Keluarga Berencana Indonesia (PKBI) atau *Indonesia Planned Parenthood Federation* (IPPF). PKBI memperjuangkan terwujudnya keluarga-keluarga yang sejahtera melalui 3 macam usaha pelayanan yaitu mengatur kehamilan atau menjarangkan kehamilan, mengobati kemandulan serta memberi nasihat perkawinan.

Pada tahun 1967, PKBI diakui sebagai badan hukum oleh Departemen Kehakiman. Kelahiran Orde Baru pada waktu itu menyebabkan perkembangan pesat usaha penerangan dan pelayanan KB di seluruh wilayah tanah air. Dengan lahirnya Orde Baru pada bulan maret 1966 masalah kependudukan menjadi fokus perhatian pemerintah yang meninjaunya dari berbagai perspektif. Perubahan politik berupa kelahiran Orde Baru tersebut berpengaruh pada perkembangan keluarga berencana di Indonesia. Setelah simposium Kontrasepsi di Bandung pada bulan Januari 1967 dan Kongres Nasional I PKBI di Jakarta pada tanggal 25 Februari 1967.

Dari butir-butir arahan GBHN Tahun 1999 dan perundang-undangan yang telah ada, Program Keluarga Berencana Nasional merupakan salah satu program untuk meningkatkan kualitas penduduk, mutu sumber daya manusia, kesehatan dan kesejahteraan sosial yang selama ini dilaksanakan melalui pengaturan kelahiran, pendewasaan usia perkawinan, peningkatan ketahanan keluarga dan kesejahteraan keluarga. Arahan GBHN ini kemudian dijabarkan lebih lanjut dalam Program Pembangunan Nasional (PROPENAS) yang telah ditetapkan sebagai Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2000.

Sejalan dengan era desentralisasi, eksistensi program dan kelembagaan keluarga berencana nasional di daerah mengalami masa-masa kritis. Sesuai dengan Keppres Nomor 103 Tahun 2001, yang kemudian diubah menjadi Keppres Nomor 09 Tahun 2004 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non Departemen menyatakan bahwa sebagian urusan di bidang keluarga berencana diserahkan kepada pemerintah kabupaten dan kota selambat-lambatnya Desember 2003. Hal ini sejalan dengan esensi UU Nomor 22 Tahun 1999 (telah diubah menjadi Undang- Undang Nomor 32 Tahun 2004). Dengan demikian tahun 2004 merupakan tahun pertama Keluarga Berencana Nasional dalam era desentralisasi.

2. Visi dan Misi BKKBN Provinsi Sumatera Utara

a. Visi BKKBN Provinsi Sumatera Utara

BKKBN memiliki visi “Mewujudkan keluarga berkualitas dan pertumbuhan penduduk yang seimbang guna mendukung tercapainya Indonesia Maju yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian berlandaskan gotong royong.”

Visi ini mengandung pengertian:

- 1) Keluarga berkualitas, yaitu tenteram, mandiri, dan bahagia.
- 2) Kebijakan pengendalian penduduk dilaksanakan untuk mewujudkan Penduduk Tumbuh Seimbang (PTS) dan menghasilkan bonus demografi. Untuk mencapai kondisi ini, angka kelahiran total (TFR) diturunkan secara nasional menjadi 2,26 pada tahun 2020 sampai dengan 2,1 di tahun 2024.
- 3) Pengaturan kelahiran melalui berbagai kegiatan prioritas Bidang Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi (KBKR) yang komprehensif dan Pendewasaan Usia Perkawinan (PUP) untuk menurunkan TFR serta meningkatkan kesehatan ibu dan anak guna membangun manusia berkualitas dan berdaya saing.

- 4) Pembangunan keluarga yang holistik integratif sesuai siklus hidup sebagai upaya meningkatkan kualitas keluarga yang berketahanan dan berkarakter.

b. Misi BKKBN untuk mencapai visi diatas adalah:

- 1) Mengendalikan pertumbuhan penduduk dalam rangka menjaga kualitas dan struktur penduduk seimbang.
- 2) Menyelenggarakan keluarga berencana dan kesehatan reproduksi secara komprehensif.
- 3) Menyelenggarakan pembangunan keluarga yang holistik integratif sesuai siklus hidup.
- 4) Membangun kemitraan, jejaring kerja, peran serta masyarakat, dan kerjasama global.
- 5) Memperkuat inovasi, teknologi, informasi, dan komunikasi.
- 6) Membangun kelembagaan, meningkatkan kapasitas, dan kesejahteraan SDM aparatur.

3. Tugas Pokok dan Fungsi BKKBN Provinsi Sumatera Utara

a. Tugas Pokok BKKBN Provinsi Sumatera Utara

Dalam melaksanakan tugas, BKKBN menyelenggarakan fungsi:

- 1) Perumusan kebijakan nasional, pepaduan dan sinkronisasi kebijakan di bidang KKB;
- 2) Penetapan Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria di bidang KKB;
- 3) Pelaksanaan advokasi dan koordinasi di bidang pengendalian penduduk dan KB;
- 4) Penyelenggaraan komunikasi, informasi, dan edukasi di bidang KKB;
- 5) Penetapan perkiraan pengendalian penduduk secara nasional;
- 6) Penyusunan desain Program KKBPB;

- 7) Pengelolaan tenaga penyuluh KB/petugas lapangan KB (PKB/PLKB);
- 8) Pengelolaan dan penyediaan alat dan obat kontrasepsi untuk kebutuhan PUS nasional;
- 9) Pengelolaan dan pengendalian sistem informasi keluarga;
- 10) Pemberdayaan dan peningkatan peran serta organisasi kemasyarakatan tingkat nasional dalam pengendalian pelayanan dan pembinaan kesertaan ber-KB dan Kesehatan Reproduksi (KR);
- 11) Pengembangan desain program pembangunan keluarga melalui pembinaan ketahanan dan kesejahteraan keluarga;
- 12) Pemberdayaan dan peningkatan peran serta organisasi kemasyarakatan tingkat nasional dalam pembangunan keluarga melalui ketahanan dan kesejahteraan keluarga;
- 13) Standardisasi pelayanan KB dan sertifikasi tenaga penyuluh KB/petugas lapangan KB (PKB/PLKB);
- 14) Penyelenggaraan pemantauan dan evaluasi di bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana;
- 15) Pembinaan, pembimbingan, dan fasilitasi di bidang KKB.

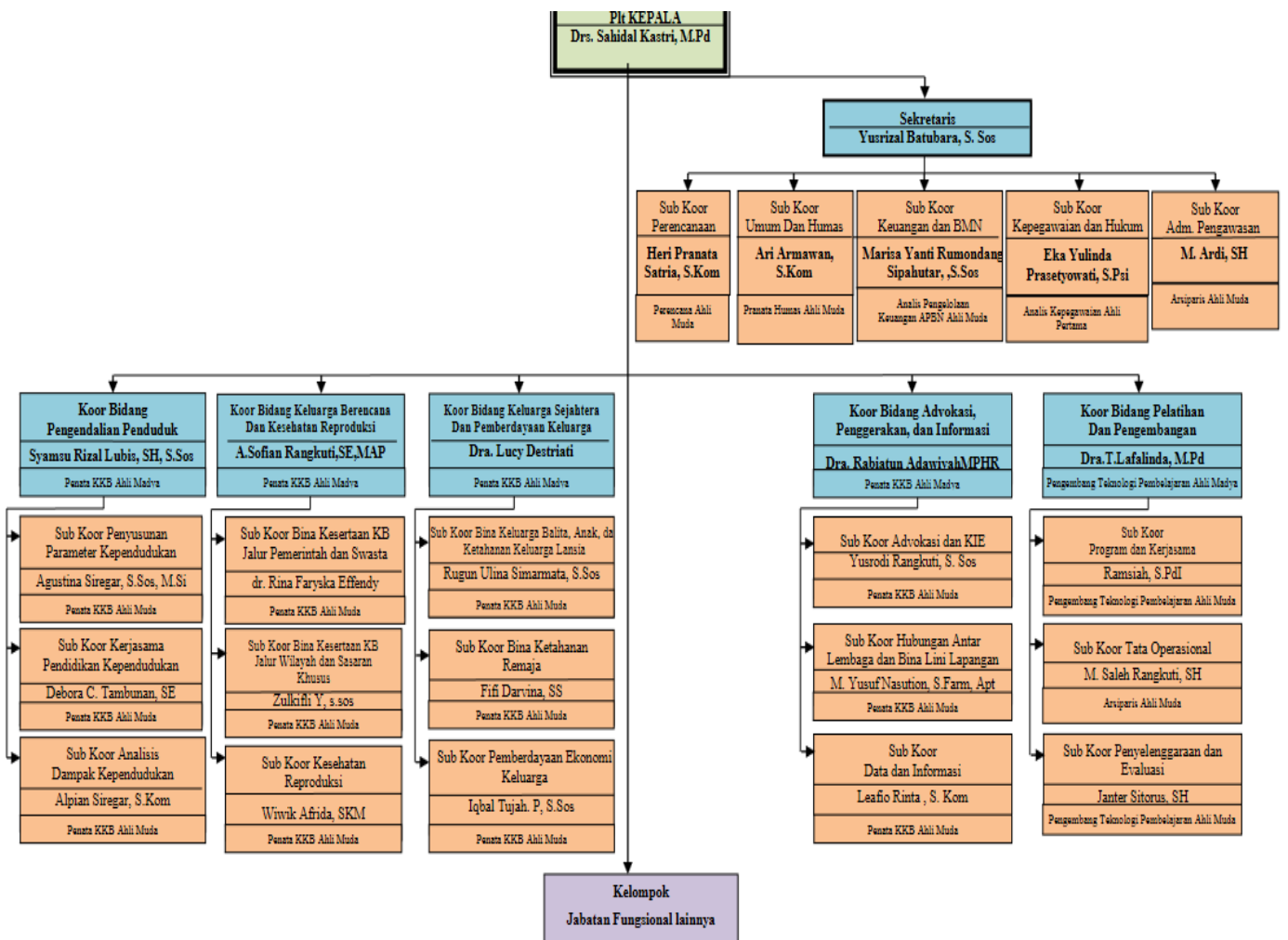
b. Fungsi BKKBN Provinsi Sumatera Utara

BKKBN juga menyelenggarakan fungsi:

- 1) Penyelenggaraan pelatihan, penelitian, dan pengembangan di bidang KKB;
- 2) Pembinaan dan koordinasi pelaksanaan tugas administrasi umum di lingkungan BKKBN;
- 3) Pengelolaan barang milik/kekayaan negara yang menjadi tanggung jawab BKKBN;
- 4) Pengawasan atas pelaksanaan tugas di lingkungan BKKBN;

4. Struktur Organisasi

Setiap instansi perkantoran pasti memiliki struktur organisasi, struktur organisasi sangat penting di dalam perkantoran karena berfungsi sebagai landasan bagi seluruh fungsi yang ada dalam organisasi untuk melaksanakan tugas, wewenang, dan tanggung jawab dari setiap fungsi. Struktur organisasi dapat dilihat pada Bagan dibawah ini.



Gambar 4.1
Struktur Organisasi

Organisasi BKKBN Provinsi Sumatera Utara terdiri dari :

- a. Kepala
- b. Sekretaris, membawahkan:
 - 1) Sub Koor Perencanaan
 - 2) Sub Koor Umum dan Humas
 - 3) Sub Koor Keuangan dan BMN
 - 4) Sub Koor Kepegawaian dan Hukum
 - 5) Sub Koor Adm Pengawasan
- c. Bidang Pengendalian Penduduk, membawahkan:
 - 1) Sub Koor Penyusunan Parameter Kependudukan
 - 2) Sub Koor Kerjasama Pendidikan Kependudukan
 - 3) Sub Koor Analisis Dampak Kependudukan
- d. Bidang Keluarga Berencana Dan Kesehatan Reproduksi, membawahkan:
 - 1) Sub Koor Bina Kesertaan KB Jalur Pemerintah dan Swasta
 - 2) Sub Koor Bina Kesehatan KB Jalur Wilayah dan Sasaran
 - 3) Sub Koor Kesehatan Reproduksi
- e. Bidang Keluarga Sejahtera Dan Pemberdayaan Keluarga, membawahkan:
 - 1) Sub Koor Bina Keluarga Balita, Anak, dan Ketahanan Keluarga Lansia
 - 2) Sub Koor Bina Ketahanan Remaja
 - 3) Sub Koor Pemberdayaan Ekonomi Keluarga
- f. Bidang Advokasi, Penggerakan, dan Informasi, membawahkan:
 - 1) Sub Koor Advokasi dan KIE
 - 2) Sub Koor Hubungan Antar Lembaga dan Bina Lini Lapangan
 - 3) Sub Koor Data dan Informasi
- g. Bidang Pelatihan Dan Pengembangan, membawahkan:
 - 1) Sub Koor Program dan Kerjasama
 - 2) Sub Koor Tata Operasional
 - 3) Sub Koor Penyelenggaraan dan Evaluasi

h. Kelompok Jabatan Fungsional Lainnya

B. Deskripsi Data Penelitian

Berdasarkan data yang berhasil dikumpulkan dalam penelitian, kuesioner yang dibagikan sejumlah 17 lembar. Adapun gambaran karakteristik data kuesioner dan deskriptif adalah sebagai berikut:

Tabel 4.1

Data Sampel Penelitian

No.	Keterangan	Jumlah Kuesioner	Persentase
1.	Kuesioner yang disebar	17	100%
2.	Kuesioner yang tidak kembali	0	0%
3.	Kuesioner yang kembali	17	100%
4.	Kuesioner yang cacat	0	0%
5.	Pengalaman kerja dibawah 1 tahun	0	0%
6.	Kuesioner yang dapat diolah	17	100%

Sumber : Data Primer 2021

Tabel 4.1 menunjukkan bahwa kuesioner yang disebar berjumlah 17 butir dan jumlah kuesioner yang kembali dan dapat diolah adalah sebanyak 17 butir atau tingkat pengembalian yang diperoleh adalah 100% dari total yang disebar.

1. Uji Deskriptif

a. Distribusi Frekuensi Responden Berdasarkan Jenis Kelamin

Dalam penelitian ini yang menjadi responden adalah Pegawai yang bekerja sebagai Pengelola BMN & Laporan Keuangan di BKKBN Provinsi Sumatera Utara. Kuesioner yang dapat diolah dalam penelitian ini sebanyak 17. Deskriptif responden berdasarkan jenis kelamin dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 4.2
Distribusi Frekuensi Berdasarkan Jenis Kelamin

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Laki-Laki	7	41.2	41.2	41.2
Valid Perempuan	10	58.8	58.8	100.0
Total	17	100.0	100.0	

Sumber: Data Primer diolah dengan SPSS

Tabel 4.2 di atas menjelaskan bahwa dari 17 responden sebanyak 7 orang (41,2%) berjenis kelamin laki-laki, dan 10 orang (58,8%) berjenis kelamin perempuan.

b. Distribusi Frekuensi Responden Berdasarkan Usia

Dalam penelitian ini yang menjadi responden adalah Pegawai yang bekerja sebagai Pengelola BMN & Laporan Keuangan di BKKBN Provinsi Sumatera Utara. Kuesioner yang dapat diolah dalam penelitian ini sebanyak 17. Deskriptif responden berdasarkan usia dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 4.3
Distribusi Responden Berdasarkan Usia

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
25-30 Tahun	6	35.3	35.3	35.3
31-35 Tahun	4	23.5	23.5	58.8
Valid 36-40 Tahun	3	17.6	17.6	76.5
> 41 Tahun	4	23.5	23.5	100.0
Total	17	100.0	100.0	

Sumber: Data Primer diolah dengan SPSS

Tabel di atas menjelaskan bahwa dari 17 responden sebanyak 6 orang (35,3%) yang berusia 25-30 tahun, 4 orang (23,5%) berusia 31-35 tahun, 3 orang (17,6%) berusia 36-40 tahun, dan 4 orang (23,5%) berusia diatas 41 tahun.

c. Distribusi Frekuensi Berdasarkan Pendidikan

Dalam penelitian ini yang menjadi responden adalah Pegawai yang bekerja sebagai Pengelola BMN & Laporan Keuangan di BKKBN Provinsi Sumatera Utara. Kuesioner yang dapat diolah dalam penelitian ini sebanyak 17. Deskriptif responden berdasarkan pendidikan dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 4.4
Distibusi Frekuensi Berdasarkan Pendidikan

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
SMA	3	17.6	17.6	17.6
D3	5	29.4	29.4	47.1
Valid S1	8	47.1	47.1	94.1
S2	1	5.9	5.9	100.0
Total	17	100.0	100.0	

Sumber: Data Primer diolah dengan SPSS

Tabel di atas menjelaskan bahwa dari 17 responden sebanyak 3 orang (17,6%) berijazah SMA, 5 orang (29,4%) berijazah D3, 8 orang (47,1%) berijazah S1, dan 1 orang (5,9%) berijazah S2.

d. Distribusi Frekuensi Berdasarkan Masa Kerja

Dalam penelitian ini yang menjadi responden adalah Pegawai yang bekerja sebagai Pengelola BMN & Laporan Keuangan di BKKBN Provinsi Sumatera Utara. Kuesioner yang dapat diolah dalam penelitian ini sebanyak 17. Deskriptif responden berdasarkan masa kerja dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 4.5
Distribusi Frekuensi Berdasarkan Masa Kerja

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid 1-3 Tahun	3	17.6	17.6	17.6
4-7 Tahun	6	35.3	35.3	52.9
8-10 Tahun	5	29.4	29.4	82.4
11-15 Tahun	2	11.8	11.8	94.1
> 15 Tahun	1	5.9	5.9	100.0
Total	17	100.0	100.0	

Sumber: Data diolah dengan SPSS

Tabel diatas menjelaskan bahwa dari 17 responden, sebanyak 3 orang (17,6%) telah bekerja selama 1-3 tahun, 6 orang (35,3%) telah bekerja selama 4-7 tahun, 5 orang (29,4%) telah bekerja selama 8-10 tahun, dan 2 orang (11,8%) telah bekerja selama 11-15 tahun, dan 1 orang (1%) telah bekerja selama lebih dari 15 tahun.

e. Hasil Analisis Statistik Deskriptif

Deskriptif kategori variabel menggambarkan tanggapan responden mengenai Pengaruh Etika, Kompetensi, dan Pengalaman Dalam Mengelola Barang Milik Negara Terhadap Kualitas Laporan Keuangan. Analisis deskriptif ini terdiri dari nilai rata-rata (mean), standar deviasi, nilai maksimum dan nilai minimum. Berikut ini adalah hasil analisis statistik deskriptif dari data penelitian ini yang diolah:

Tabel 4.6
Deskriptif Statistik

	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
Etika	17	44	69	56.88	7.364
Kompetensi	17	40	70	57.65	7.382
Pengalaman	17	45	72	58.00	8.456

Kualitas Laporan Keuangan	17	43	69	56.82	7.239
Valid N (listwise)	17				

Berdasarkan tabel di atas terdapat 15 pertanyaan di setiap variabel dengan jumlah responden berjumlah 17 orang. Etika (X1) responden memiliki nilai minimum 44 dan nilai paling tinggi 69. Nilai rata-rata Etika masing-masing responden sebesar 56,88 dengan simpangan baku atau penyebaran rata-rata sebesar 7,364. Kompetensi (X2) responden memiliki nilai minimum 40 dan nilai paling tinggi 70. Nilai rata-rata Kompetensi masing-masing responden sebesar 57,65 dengan simpangan baku atau penyebaran rata-rata sebesar 7,382. Pengalaman (X3) responden memiliki nilai minimum 45 dan nilai paling tinggi 72. Nilai rata-rata pengalaman masing-masing responden sebesar 58,00 dengan simpangan baku atau penyebaran rata-rata sebesar 8,456. Dan Kualitas Laporan Keuangan (Y) responden memiliki nilai minimum 43 dan nilai paling tinggi 69. Nilai rata-rata Kualitas Laporan Keuangan masing-masing responden sebesar 56,82 dengan simpangan baku atau penyebaran rata-rata sebesar 7,239.

2. Uji Kualitas Data

a. Uji Validitas

Kuisisioner yang digunakan dalam penelitian ini terlebih dahulu diuji validitas dan reliabilitasnya sebelum digunakan sebagai alat pengumpul data. Untuk uji validitas kuisisioner dilakukan dengan membandingkan r hitung atau nilai *Pearson Correlation* dengan membandingkan nilai r tabel. Apabila nilai r hitung $>$ r tabel (dengan sig. 0,05), maka butir pertanyaan tersebut dinyatakan valid. Jadi apabila nilai r hitung atau nilai *Pearson Correlation* lebih kecil dari nilai r tabel maka butir pertanyaan dalam kuisisioner untuk variabel tersebut tidak valid atau jika r hitung $<$ r tabel (dengan sig. 0,05), maka kuisisioner tersebut tidak valid.

1) Variabel Etika

Untuk itu dilakukan uji coba terhadap instrumen kepada 17 orang sampel, dengan menggunakan teknik *Pearson Correlation* dengan tingkat kepercayaan 95% ($\alpha = 0,05$).

Adapun hasil uji validitas untuk etika (X1) dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 4.7
Uji Validitas Etika

No Item Pernyataan	R Hitung	Nilai R Tabel (Taraf Sig.5%)	Keterangan
1.	0,684	0,482	Valid
2.	0,710	0,482	Valid
3.	0,657	0,482	Valid
4.	0,687	0,482	Valid
5.	0,760	0,482	Valid
6.	0,543	0,482	Valid
7.	0,498	0,482	Valid
8.	0,530	0,482	Valid
9.	0,643	0,482	Valid
10.	0,716	0,482	Valid
11.	0,587	0,482	Valid
12.	0,752	0,482	Valid
13.	0,510	0,482	Valid
14.	0,856	0,482	Valid
15.	0,590	0,482	Valid

Sumber : Data primer yang diolah dengan SPSS

Hasil analisis variabel etika menunjukkan adanya 15 butir pernyataan yang diajukan adalah valid. Berdasarkan hal tersebut maka dapat dikatakan bahwa butir pernyataan dapat digunakan karena $r_{hitung} > r_{tabel}$ sehingga dapat dikatakan memenuhi syarat validitas.

2) Variabel Kompetensi

Untuk itu dilakukan uji coba terhadap instrumen kepada 17 orang sampel, dengan menggunakan teknik *Pearson Correlation* dengan tingkat kepercayaan 95% ($\alpha = 0,05$).

Adapun hasil uji validitas untuk kompetensi (X2) dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 4.8
Uji Validitas Kompetensi

No Item Pernyataan	R Hitung	Nilai R Tabel (Taraf Sig.5%)	Keterangan
1.	0,555	0,482	Valid
2.	0,660	0,482	Valid
3.	0,704	0,482	Valid
4.	0,670	0,482	Valid
5.	0,618	0,482	Valid
6.	0,518	0,482	Valid
7.	0,493	0,482	Valid
8.	0,557	0,482	Valid
9.	0,587	0,482	Valid
10.	0,580	0,482	Valid
11.	0,752	0,482	Valid
12.	0,611	0,482	Valid
13.	0,505	0,482	Valid
14.	0,763	0,482	Valid
15.	0,533	0,482	Valid

Sumber : Data primer yang diolah dengan SPSS

Hasil analisis variabel etika menunjukkan adanya 15 butir pernyataan yang diajukan adalah valid. Berdasarkan hal tersebut maka dapat dikatakan bahwa butir pernyataan dapat digunakan karena $r_{hitung} > r_{tabel}$ sehingga dapat dikatakan memenuhi syarat validitas.

3) Variabel Pengalaman

Untuk itu dilakukan uji coba terhadap instrumen kepada 17 orang sampel, dengan menggunakan teknik *Pearson Correlation* dengan tingkat kepercayaan 95% ($\alpha = 0,05$).

Adapun hasil uji validitas untuk pengalaman (X3) dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 4.9
Uji Validitas Pengalaman

No Item Pernyataan	R Hitung	Nilai R Tabel (Taraf Sig.5%)	Keterangan
1.	0,530	0,482	Valid
2.	0,711	0,482	Valid
3.	0,683	0,482	Valid
4.	0,696	0,482	Valid
5.	0,572	0,482	Valid
6.	0,678	0,482	Valid
7.	0,648	0,482	Valid
8.	0,690	0,482	Valid
9.	0,599	0,482	Valid
10.	0,747	0,482	Valid
11.	0,610	0,482	Valid
12.	0,760	0,482	Valid
13.	0,615	0,482	Valid
14.	0,804	0,482	Valid
15.	0,859	0,482	Valid

Sumber : Data primer yang diolah dengan SPSS

Hasil analisis variabel etika menunjukkan adanya 15 butir pernyataan yang diajukan adalah valid. Berdasarkan hal tersebut maka dapat dikatakan bahwa butir pernyataan dapat digunakan karena $r_{hitung} > r_{tabel}$ sehingga dapat dikatakan memenuhi syarat validitas.

4) Variabel Kualitas Laporan Keuangan

Untuk itu dilakukan uji coba terhadap instrumen kepada 17 orang sampel, dengan menggunakan teknik *Pearson Correlation* dengan tingkat kepercayaan 95% ($\alpha = 0,05$).

Adapun hasil uji validitas untuk kualitas laporan keuangan (Y) dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 4.10
Uji Validitas Kualitas Laporan Keuangan

No Item Pernyataan	R Hitung	Nilai R Tabel (Taraf Sig.5%)	Keterangan
1.	0,525	0,482	Valid
2.	0,592	0,482	Valid
3.	0,679	0,482	Valid
4.	0,628	0,482	Valid
5.	0,489	0,482	Valid
6.	0,578	0,482	Valid
7.	0,487	0,482	Valid
8.	0,634	0,482	Valid
9.	0,544	0,482	Valid
10.	0,574	0,482	Valid
11.	0,706	0,482	Valid
12.	0,763	0,482	Valid
13.	0,583	0,482	Valid
14.	0,676	0,482	Valid
15.	0,728	0,482	Valid

Sumber : Data primer yang diolah dengan SPSS

Hasil analisis variabel etika menunjukkan adanya 15 butir pernyataan yang diajukan adalah valid. Berdasarkan hal tersebut maka dapat dikatakan

bahwa butir pernyataan dapat digunakan karena $r_{hitung} > r_{tabel}$ sehingga dapat dikatakan memenuhi syarat validitas.

b. Uji Reliabilitas

Suatu kuisioner dinyatakan reliabel jika jawaban seorang terhadap pertanyaan adalah konsisten atau stabil dari waktu. Pengujian reliabilitas untuk variabel-variabel dalam penelitian ini menggunakan *Cronbach Alpha*. Variabel-variabel dalam penelitian ini dapat dikategorikan reliabel apabila nilai *Cronbach Alpha* lebih besar dari 0,60.

1) Uji Reliabilitas Etika

Adapun hasil uji reliabilitas yang dilakukan terhadap etika (X1) dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 4.11
Hasil Uji Reliabilitas Etika

Reliability Statistics	
Cronbach's Alpha	N of Items
.878	15

Sumber: Data primer yang diolah dengan SPSS

Dari tabel di atas diperoleh nilai *Cronbach Alpha* sebesar 0,878, nilai ini $> 0,60$. Maka dapat disimpulkan bahwa item etika (X1) reliabel.

2) Uji Reliabilitas Kompetensi

Adapun hasil uji reliabilitas yang dilakukan terhadap Kompetensi (X2) dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 4.12
Hasil Uji Reliabilitas Kompetensi

Reliability Statistics	
Cronbach's Alpha	N of Items
.844	15

Sumber: Data Primer yang diolah dengan SPSS

Dari tabel di atas diperoleh nilai Cronbach Alpha sebesar 0,844, nilai ini > 0,60. Maka dapat disimpulkan bahwa item kompetensi (X2) reliabel.

3) Uji Realibilitas Pengalaman

Adapun hasil uji reliabilitas yang dilakukan terhadap Pengalaman (X3) dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 4.13
Hasil Uji Reliabilitas Pengalaman

Reliability Statistics	
Cronbach's Alpha	N of Items
.896	15

Sumber: Data Primer yang diolah dengan SPSS

Dari tabel di atas diperoleh nilai *Cronbach Alpha* sebesar 0,896, nilai ini > 0,60. Maka dapat disimpulkan bahwa item pengalaman (X3) reliabel.

4) Uji Realibilitas Kualitas Laporan Keuangan

Adapun hasil uji reliabilitas yang dilakukan terhadap Kualitas Laporan Keuangan (Y) dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 4.14
Hasil Uji Reliabilitas Kualitas Laporan Keuangan

Reliability Statistics	
Cronbach's Alpha	N of Items
.850	15

Sumber: Data Primer yang diolah dengan SPSS

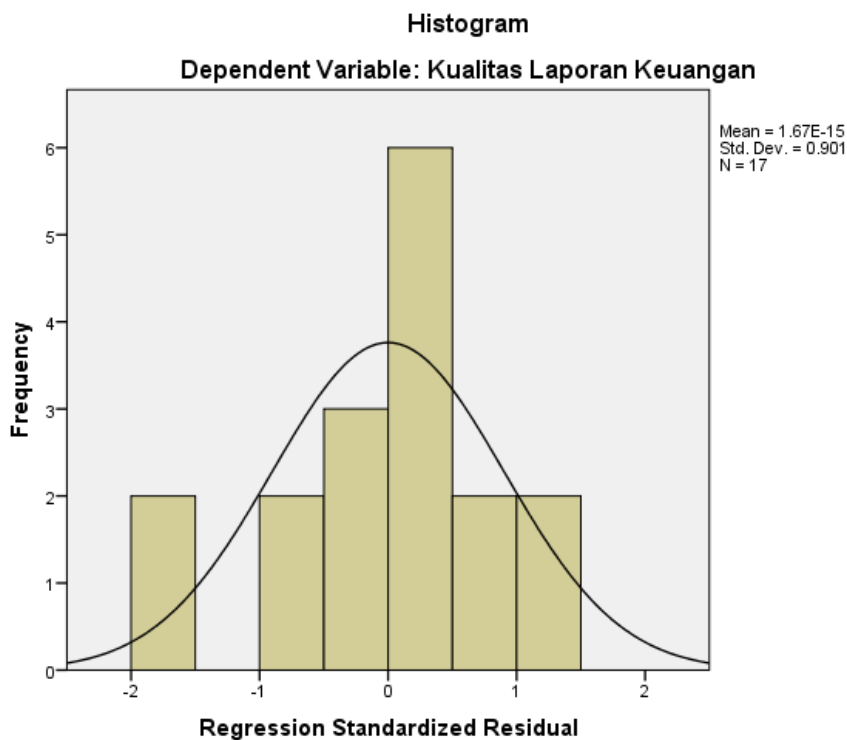
Dari tabel di atas diperoleh nilai *Cronbach Alpha* sebesar 0,850, nilai ini > 0,60. Maka dapat disimpulkan bahwa item kualitas laporan keuangan (Y) reliabel.

C. Uji Asumsi Klasik

1. Uji Normalitas

Uji normalitas merupakan salah satu bagian dari uji analisis data, artinya sebelum melakukan analisis sesungguhnya, data penelitian tersebut harus diuji kenormalan distribusinya. Model regresi yang baik adalah yang memiliki distribusi data normal atau mendekati normal. Normalitas data bertujuan untuk mengetahui distribusi normal atau tidak.

Hasil uji normalitas dapat dilihat pada diagram histogram pada gambar 4.2 sebagai berikut :

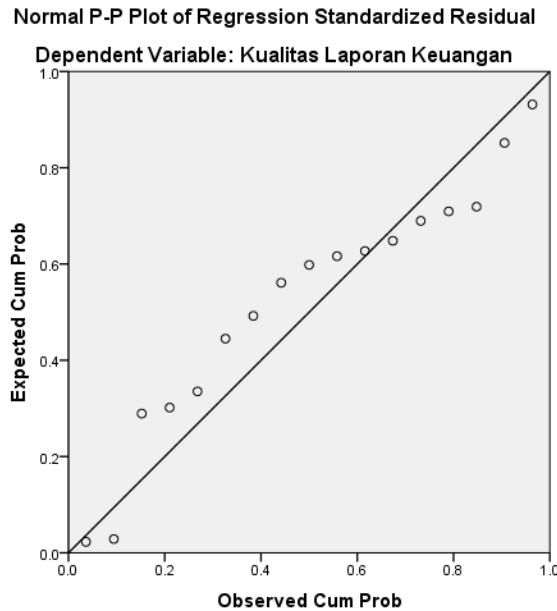


Gambar 4.2

Histogram Display Normal Curve

Berdasarkan gambar 4.2 histogram di atas, dapat diketahui bahwa seluruh variabel berdistribusi normal karena memiliki kemiringan yang seimbang dari sisi kanan dan kiri, serta garisnya juga menyerupai lonceng.

Normalitas data juga dapat dilihat dari output kurva normal *P-Plot*.



Gambar 4.3

Hasil Uji Normalitas dengan Normal *P-Plot*

Berdasarkan gambar 4.3 menunjukkan bahwa titik-titik atau pola menyebar di sekitar diagonal dan mengikuti diagonal tersebut sehingga data penelitian telah terdistribusi normal.

Selain itu teknik lainnya yaitu dengan uji *Kolmogrov Smirnov Test*. Jika nilai asymptotic significant (*2-tailed*) lebih dari 0,05 maka dapat disimpulkan bahwa data variabel telah berdistribusi normal. Hasil uji normalitas seluruh variabel menggunakan perhitungan *Kolmogrov-Smirnov* menggunakan Software SPSS dapat dilihat di bawah ini :

Tabel 4.15

Hasil Uji Normalitas

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test		Unstandardized Residual
N		17
Normal Parameters ^{a,b}	Mean	0E-7

	Std. Deviation	1.21945963
	Absolute	.156
Most Extreme Differences	Positive	.142
	Negative	-.156
Kolmogorov-Smirnov Z		.643
Asymp. Sig. (2-tailed)		.803

a. Test distribution is Normal.

b. Calculated from data.

Sumber : Data primer yang diolah dengan SPSS

Dari tabel 4.15, hasil uji K-S diketahui bahwa nilai *asympt.sig. (2-tailed)* sebesar $0,803 > 0,05$, jadi dapat disimpulkan bahwa data tersebut berdistribusi normal.

2. Uji Multikolonieritas

Uji Multikolonieritas bertujuan untuk menguji apakah model regresi ditemukan adanya korelasi antar variabel bebas (independen). Model regresi yang baik seharusnya tidak terjadi korelasi di antara variabel independen. Adapun hasil uji multikolonieritas tersaji dalam tabel berikut ini:

Tabel 4.16
Uji Multikolinearitas

Coefficients ^a							
Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.	Collinearity Statistics	
	B	Std. Error	Beta			Tolerance	VIF
1	(Constant)	1.561	2.741		.569	.579	
	Etika	.333	.136	.338	2.451	.029	.114
	Kompetensi	.384	.123	.392	3.119	.008	.138
	Pengalaman	.245	.108	.286	2.266	.041	.137

a. Dependent Variable: Kualitas Laporan Keuangan

Sumber : Data Primer yang diolah dengan SPSS

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa nilai VIF untuk variabel etika sebesar $8,734 < 10$, kompetensi sebesar $7,227 < 10$, dan Pengalaman sebesar $7,288 < 10$. Begitu juga untuk nilai tolerance etika sebesar $0,114$, kompetensi

sebesar 0,138, dan pengalaman sebesar 0,137 lebih dari 0,1. Hal ini membuktikan bahwa model regresi yang digunakan dalam penelitian ini tidak terdapat adanya multikolinearitas.

3. Uji Heterokedastisitas

Uji Heteroskedastisitas bertujuan menguji apakah dalam model regresi terjadi ketidaksamaan variance dari residual satu pengamatan ke pengamatan yang lain. Ada tidaknya gejala penyakit heteroskedastisitas dapat dilihat dari besarnya nilai signifikansi, jika nilai signifikansi lebih besar dari 0,05 maka dinyatakan tidak ada gejala penyakit heteroskedastisitas. Berikut tabel uji Heteroskedastisitas:

Tabel 4.17
Uji Heterokedastisitas

Coefficients ^a					
Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	T	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
1 (Constant)	-1.058	1.719		-.616	.549
Etika	.052	.085	.477	.616	.548
Kompetensi	-.015	.077	-.138	-.196	.848
Pengalaman	-.003	.068	-.030	-.043	.966

a. Dependent Variable: RES2

Sumber : Data Primer yang diolah dengan SPSS

Berdasarkan tabel di atas, menunjukkan bahwa tidak ada satupun variabel independen yang signifikan secara statistik mempengaruhi variabel dependen nilai. Hal ini terlihat dari probabilitas signifikansinya di atas tingkat kepercayaan 5%. Jadi dapat disimpulkan model regresi tidak mengandung adanya heteroskedastisitas.

D. Uji Hipotesis

1. Uji Koefisien Determinasi (R^2)

Koefisien determinasi (R^2) pada intinya mengukur seberapa jauh kemampuan model dalam menerangkan variasi variabel dependen. Nilai koefisien determinasi adalah antara nol dan satu. Nilai R^2 yang kecil berarti kemampuan variabel-variabel independen dalam menjelaskan variasi variabel dependen amat terbatas. Nilai yang mendekati satu berarti variabel-variabel independen memberikan hampir semua informasi yang dibutuhkan untuk memprediksi variasi variabel dependen. Hasil uji determinasi dalam penelitian ini dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 4.18

Uji R^2

Model Summary ^b				
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.986 ^a	.972	.965	1.353

a. Predictors: (Constant), Pengalaman, Kompetensi, Etika

b. Dependent Variable: Kualitas Laporan Keuangan

Sumber : Data primer yang diolah dengan SPSS

Berdasarkan tabel diatas, besarnya angka koefisien determinasi (R^2) adalah sebesar 0,972 atau 97,2%. Angka tersebut berarti bahwa sebesar 97,2% tingkat kualitas laporan keuangan yang terjadi dapat dijelaskan dengan variabel Etika, Kompetensi, dan Pengalaman Dalam Mengelola Barang Milik Negara. Sementara sisanya, yaitu 2,8% harus dijelaskan oleh faktor-faktor penyebab lainnya.

2. Uji t (t-test)

Berdasarkan uji t (uji parsial) melalui diperoleh hasil variabel bebas yaitu Etika (X1), Kompetensi (X2), dan Pengalaman (X3) terhadap variabel kualitas laporan keuangan (Y). Kriteria pengujian yang digunakan adalah dengan membandingkan thitung dengan ttabel berdasarkan signifikansi 0,05 dan 2 sisi dengan derajat kebebasan $df (n-k-1) = 17-3-1 = 13$ (adalah jumlah data dan

variabel independen). Sehingga ttabel yang diperoleh dari tabel statistik adalah sebesar 2,160.

Tabel 4.19

Uji t

Coefficients^a

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	T	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
(Constant)	1.561	2.741		.569	.579
1 Etika	.333	.136	.338	2.451	.029
Kompetensi	.384	.123	.392	3.119	.008
Pengalaman	.245	.108	.286	2.266	.041

a. Dependent Variable: Kualitas Laporan Keuangan

Sumber : Data primer yang diolah dengan SPSS

Berdasarkan tabel diatas dapat diketahui bahwa:

- 1) Nilai signifikansi variabel Etika (X1) adalah sebesar 0,029, dimana nilai signifikansi tersebut lebih kecil dari 0,05 dan t hitung (2,451) lebih besar dari t tabel (2,160), hasil tersebut menunjukkan bahwa Etika (X1) secara parsial berpengaruh positif signifikan terhadap Kualitas Laporan Keuangan (Y), sehingga membuktikan bahwa Ha1 diterima dan H01 ditolak.
- 2) Nilai signifikansi variabel Kompetensi (X2) adalah sebesar 0,008, dimana nilai signifikansi tersebut lebih kecil dari 0,05 dan t hitung (3,119) lebih besar dari t tabel (2,160), hasil tersebut menunjukkan bahwa kompetensi (X2) secara parsial berpengaruh positif signifikan terhadap Kualitas Laporan Keuangan, sehingga membuktikan bahwa Ha2 diterima dan H02 ditolak.
- 3) Nilai signifikansi variabel Pengalaman (X3) adalah sebesar 0,041, dimana nilai signifikansi lebih kecil dari 0,05 dan t hitung (2,266) lebih besar dari t tabel (2,160), maka dapat dikatakan bahwa pengalaman (X3) secara parsial berpengaruh positif dan

signifikan terhadap Kualitas Laporan Keuangan, sehingga membuktikan bahwa H_3 diterima dan H_{03} ditolak.

3. Uji F (F test)

Uji statistik F adalah uji yang menunjukkan apakah semua variabel bebas yang dimasukkan dalam model mempunyai pengaruh secara bersama-sama terhadap variabel terikat/dependen. Hasil Uji F dalam penelitian ini dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 4.20

Uji F

ANOVA^a

Model	Sum of Squares	Df	Mean Square	F	Sig.
1 Regression	814.677	3	271.559	148.372	.000 ^b
Residual	23.793	13	1.830		
Total	838.471	16			

a. Dependent Variable: Kualitas Laporan Keuangan

b. Predictors: (Constant), Pengalaman, Kompetensi, Etika

Sumber : Data primer yang diolah dengan SPSS

Berdasarkan Uji F diatas, di dapat nilai F hitung sebesar 148,372 dengan probabilitas 0,000. Karena probabilitas lebih kecil dari 0,05 ($0,000 < 0,05$) dan F hitung (148,372) lebih besar dari F tabel (3,34), maka model regresi dapat digunakan untuk memprediksi Kualitas Laporan Keuangan atau dapat dikatakan bahwa Etika, Kompetensi, dan Pengalaman Dalam Mengelola Barang Milik Negara secara simultan berpengaruh terhadap Kualitas Laporan Keuangan sehingga membuktikan bahwa H_{04} ditolak dan H_{a4} diterima.

E. Regresi Linier Berganda

Analisis regresi dalam penelitian ini dilakukan dengan menggunakan program SPSS, maka dapat diperoleh hasil sebagai berikut :

Tabel 4.21
Hasil Uji Analisis Regresi Linear Berganda

Model	Coefficients ^a						
	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	T	Sig.	Collinearity Statistics	
	B	Std. Error	Beta			Tolerance	VIF
(Constant)	1.561	2.741		.569	.579		
1 Etika	.333	.136	.338	2.451	.029	.114	8.734
Kompetensi	.384	.123	.392	3.119	.008	.138	7.227
Pengalaman	.245	.108	.286	2.266	.041	.137	7.288

a. Dependent Variable: Kualitas Laporan Keuangan

Sumber : Data primer yang diolah dengan SPSS

Dari nilai-nilai koefisien di atas, dapat disusun persamaan regresi berganda sebagai berikut :

$$Y = 1,561 + 0,333X1 + 0,384X2 + 0,245X3 + e$$

Y = Kualitas Laporan Keuangan

X1 = Etika

X2 = Kompetensi

X3 = Pengalaman

e = Standart Error

Berdasarkan hasil persamaan regresi linier berganda tersebut, dapat diinterpretasikan sebagai berikut :

1. Nilai konstanta (a) sebesar 1,561 menunjukkan bahwa ketika variabel etika, kompetensi dan pengalaman konstan atau = 0, maka kualitas laporan keuangan meningkat sebesar 1,561 satuan.
2. Nilai koefisien regresi Etika (X1) sebesar 0,333 artinya apabila Etika meningkat satu maka Kualitas Laporan Keuangan akan mengalami kenaikan sebesar 0,333.

3. Nilai koefisien regresi Kompetensi (X2) sebesar 0,384 artinya apabila Kompetensi meningkat satu maka Kualitas Laporan Keuangan akan mengalami kenaikan sebesar 0,384.
4. Nilai koefisien regresi Pengalaman (X3) sebesar 0,245 artinya apabila Pengalaman meningkat satu maka Kualitas Laporan Keuangan akan mengalami kenaikan sebesar 0,245.

F. Pembahasan

Dalam pembahasan ini yang akan diuraikan terkait dengan pembahasan mengenai Etika, Kompetensi, dan Pengalaman Dalam Mengelola Barang Milik Negara terhadap kualitas laporan keuangan.

1. Pengaruh Etika Dalam Mengelola Barang Milik Negara Terhadap Kualitas Laporan Keuangan

Berdasarkan hasil penelitian membuktikan nilai thitung lebih besar dari ttabel, ($2,451 > 2,160$) atau ($\text{sig } 0.029 < 0.05$). Hal ini menunjukkan bahwa variabel etika dalam mengelola barang milik negara secara parsial berpengaruh signifikan terhadap kualitas laporan keuangan dengan kata lain, hipotesis (H_{a1}) diterima.

Etika adalah sebuah ilmu yang mempelajari bagaimana berperilaku jujur, benar, dan adil. Etika merupakan cabang ilmu filsafat, mempelajari perilaku moral dan amoral, membuat pertimbangan matang yang patut dilakukan oleh seseorang kepada orang lain atau kelompok tertentu. Etika dikategorikan sebagai filsafat moral atau etika normatif. Etika adalah suatu perilaku normatif.

Masalah Etika merupakan masalah yang penting dalam sebuah pekerjaan. Begitupun untuk profesi seorang pengelola aset. Hal ini akan berkaitan dengan kualitas laporan keuangan. Sikap mental dan etika yang baik dalam pembuatan laporan keuangan akan memberikan nilai tambah untuk laporan keuangan. Sebaliknya, dengan sikap mental dan etika yang buruk dalam pembuatan laporan keuangan akan memberikan citra negatif untuk laporan keuangan (Rifa'i, 2014). Oleh karena itu untuk menghasilkan laporan keuangan yang berkualitas maka

dibutuhkan seorang pegawai pengelola aset dibidang akuntansi yang juga didukung dengan etika yang baik.

Setiap manusia, siapapun dan apapun profesinya, membutuhkan perenungan-perenungan atas moralitas yang terkait dengan profesinya, begitu juga dengan profesi pengelola aset. Dalam praktiknya, profesi sebagai pengelola aset dituntut untuk harus selalu memperhatikan etika selama menjalankan tugasnya. Hal ini tentu wajar karena terkait dengan bagaimana cara mengelola barang milik negara dengan baik dan benar.

Etika dalam mengelola barang milik negara dan kualitas laporan keuangan memiliki hubungan positif, yaitu semakin baik etika dalam mengelola barang milik negara maka semakin baik pula kualitas laporan keuangan pada BKKBN Provinsi Sumatera Utara.

Hal ini sejalan dengan penelitian sebelumnya oleh Aditya Bachtiar Rifa'i tahun 2014 "Pengaruh Etika, Kompetensi, dan Pengalaman Dalam Mengelola Barang Milik Negara Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Pusat". Dari hasil penelitian dihasilkan bahwa variabel etika dalam mengelola barang milik negara berpengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas laporan keuangan.

2. Pengaruh Kompetensi Dalam Mengelola Barang Milik Negara Terhadap Kualitas Laporan Keuangan

Berdasarkan hasil penelitian membuktikan nilai thitung lebih besar dari ttabel, ($3,119 > 2,160$) atau ($\text{sig } 0.008 < 0.05$). Hal ini menunjukkan bahwa variabel kompetensi secara parsial berpengaruh signifikan terhadap kualitas laporan keuangan dengan kata lain, hipotesis (H_{a2}) diterima.

Variabel kompetensi yang dimaksud adalah kemampuan pegawai dalam melaksanakan pekerjaan yang didukung oleh sikap kerja dan tanggung jawabnya secara efektif sehingga mencapai standar kualitas profesional dalam bekerja. Sikap kerja menunjukkan bahwa pegawai mampu berada di lingkungan kerja karena memiliki nilai dan karakteristik kepribadian yang sesuai dengan pekerjaan dan lingkungannya.

Kompetensi para pengelola aset diukur melalui banyaknya ijazah/sertifikat yang dimiliki serta jumlah/banyaknya keikutsertaan yang bersangkutan dalam pelatihan-pelatihan, seminar atau simposium. Semakin banyak sertifikat yang dimiliki dan semakin sering mengikuti pelatihan diharapkan pengelola Aset BMN yang bersangkutan akan semakin cakap dalam melakukan tugasnya. Kecakapan dalam membuat laporan keuangan BMN dan kemampuan untuk mengetahui kekeliruan merupakan salah satu bagian dari kompetensi seorang pembuat laporan keuangan.

Penerapan kompetensi dalam mengelola barang milik negara dan kualitas laporan keuangan memiliki hubungan positif, yaitu semakin baik kompetensi dalam mengelola barang milik negara maka semakin baik pula kualitas laporan keuangan pada BKKBN Provinsi Sumatera Utara.

Hasil penelitian ini sejalan dengan Mutya (2019), yang menunjukkan bahwa kompetensi Sumber Daya Manusia (SDM) mempunyai pengaruh signifikan positif terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. Jadi dengan adanya kompetensi yang baik dalam mengelola barang milik negara maka akan dapat meningkatkan kualitas laporan keuangan yang dihasilkan.

3. Pengaruh Pengalaman Dalam Mengelola Barang Milik Negara Terhadap Kualitas Laporan Keuangan

Berdasarkan hasil penelitian membuktikan nilai thitung lebih besar dari ttabel, ($2,266 > 2,160$) atau ($\text{sig } 0.041 < 0.05$). Hal ini menunjukkan bahwa variabel pengalaman secara parsial berpengaruh signifikan terhadap kualitas laporan keuangan dengan kata lain, hipotesis (H_{a2}) diterima.

Pengalaman seorang profesi terutama pengelola aset merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi kualitas laporan keuangan. Pengalaman kerja merupakan cerminan dari karyawan yang mempunyai kemampuan bekerja ditempat sebelumnya selain itu dapat menggambarkan seberapa lama karyawan tersebut telah bekerja. Semakin banyak pengalaman kerja yang didapatkan oleh karyawan akan membuat karyawan tersebut semakin terlatih dan terampil dalam melaksanakan segala pekerjaan yang dilaksanakannya.

Variabel pengalaman juga merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi kualitas laporan keuangan. Semakin lama pengalaman yang dimiliki seorang pengelola aset, maka semakin mengerti dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya sehingga semakin baik pula dalam membuat laporan keuangan.

Penerapan pengalaman dalam mengelola barang milik negara dan kualitas laporan keuangan memiliki hubungan positif, yaitu semakin baik pengalaman dalam mengelola barang milik negara maka semakin baik pula kualitas laporan keuangan pada BKKBN Provinsi Sumatera Utara.

Hasil penelitian ini sejalan dengan Ari Utomo (2017) " Pengaruh Kompetensi Dan Pengalaman Dalam Mengelola Barang Milik Daerah Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Daerah Dengan Etika Sebagai Variabel Moderating". Dari hasil penelitian dihasilkan bahwa variabel pengalaman dalam mengelola barang milik negara berpengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas laporan keuangan. Jadi dengan adanya pengalaman yang baik dalam mengelola barang milik negara maka akan dapat meningkatkan kualitas laporan keuangan yang dihasilkan.

4. Pengaruh Etika, Kompetensi, dan Pengalaman Dalam Mengelola Barang Milik Negara Terhadap Kualitas Laporan Keuangan

Dari hasil penelitian menunjukkan bahwa ada pengaruh etika, kompetensi dan pengalaman dalam mengelola barang milik negara terhadap kualitas laporan keuangan pada Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Provinsi Sumatera Utara. Hal ini dibuktikan dengan hasil pengujian diperoleh F_{hitung} 148,372 dengan nilai signifikansi sebesar 0,000 lebih kecil dari 0,05 ($0,000 < 0,05$), sedangkan F_{tabel} 5% ($\alpha = 0,05$) adalah sebesar 3,34, hal ini berarti $F_{hitung} > F_{tabel}$ ($148,372 > 3,34$), perhitungan tersebut menunjukkan bahwa variabel etika, kompetensi dan pengalaman dalam mengelola barang milik negara secara bersama-sama memiliki pengaruh yang simultan terhadap kualitas laporan keuangan.

Laporan keuangan merupakan laporan yang terstruktur mengenai posisi keuangan dan transaksi-transaksi yang dilakukan oleh suatu entitas pelaporan. Laporan keuangan disusun untuk menyediakan informasi yang relevan mengenai posisi keuangan dan seluruh transaksi yang dilakukan oleh suatu entitas pelaporan selama satu periode pelaporan.

Laporan keuangan terutama digunakan untuk mengetahui nilai sumber daya ekonomi yang dimanfaatkan untuk melaksanakan kegiatan operasional pemerintahan, menilai kondisi keuangan, mengevaluasi efektivitas dan efisiensi suatu entitas pelaporan dan membantu menentukan ketaatannya terhadap peraturan perundang-undangan.

Hasil uji determinan R² pada penelitian ini diperoleh nilai determinan R² menunjukkan nilai Adjusted R² sebesar 0,972 artinya persentase sumbangan pengaruh etika, kompetensi, dan pengalaman dalam mengelola barang milik negara sebesar 97,2% sedangkan sisanya 2,8% dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak dimasukkan dalam model ini.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan penelitian yang berjudul “Pengaruh etika, kompetensi, dan pengalaman dalam mengelola barang milik negara terhadap kualitas laporan keuangan pada Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Provinsi Sumatera Utara” dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Besarnya Pengaruh Etika Dalam Mengelola Barang Milik Negara Terhadap Kualitas Laporan Keuangan

Dapat disimpulkan bahwa berdasarkan uji t, ada pengaruh positif etika dalam mengelola barang milik negara terhadap kualitas laporan keuangan. Hal ini dibuktikan dengan uji t, nilai signifikansi variabel Etika (X1) adalah sebesar 0,029, dimana nilai signifikansi tersebut lebih kecil dari 0,05 dan t hitung (2,451) lebih besar dari t tabel (2,160), hasil tersebut menunjukkan bahwa Etika (X1) secara parsial berpengaruh positif signifikan terhadap Kualitas Laporan Keuangan (Y), sehingga membuktikan bahwa Ha1 diterima dan H01 ditolak. Semakin baik etika dalam mengelola barang milik negara yang dimiliki pengelola asset, maka akan semakin tinggi kualitas laporan keuangan.

2. Besarnya Pengaruh Kompetensi Dalam Mengelola Barang Milik Negara Terhadap Kualitas Laporan Keuangan

Dapat disimpulkan bahwa berdasarkan uji t, ada pengaruh positif kompetensi dalam mengelola barang milik negara terhadap kualitas laporan keuangan. Hal ini dibuktikan dengan uji t, nilai signifikansi variabel Kompetensi (X2) adalah sebesar 0,008, dimana nilai signifikansi tersebut lebih kecil dari 0,05 dan t hitung (3,119) lebih besar dari t tabel (2,160), hasil tersebut menunjukkan bahwa kompetensi (X2) secara parsial berpengaruh positif signifikan terhadap Kualitas Laporan Keuangan, sehingga membuktikan bahwa Ha2 diterima dan H02 ditolak. Semakin tinggi kompetensi dalam mengelola

barang milik negara yang dimiliki pengelola asset, maka akan semakin tinggi kualitas laporan keuangan.

3. Besarnya Pengaruh Pengalaman Dalam Mengelola Barang Milik Negara Terhadap Kualitas Laporan Keuangan

Dapat disimpulkan bahwa berdasarkan uji t, ada pengaruh positif pengalaman dalam mengelola barang milik negara terhadap kualitas laporan keuangan. Hal ini dibuktikan dengan uji t, nilai signifikansi variabel Pengalaman (X3) adalah sebesar 0,041, dimana nilai signifikansi lebih kecil dari 0,05 dan t hitung (2,266) lebih besar dari t tabel (2,160), maka dapat dikatakan bahwa pengalaman (X3) secara parsial berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kualitas Laporan Keuangan, sehingga membuktikan bahwa H_{a3} diterima dan H_{03} ditolak. Semakin lama pengalaman dalam mengelola barang milik negara yang dimiliki pengelola asset, maka akan semakin tinggi kualitas laporan keuangan.

4. Ada Pengaruh Etika, Kompetensi, dan Pengalaman Dalam Mengelola Barang Milik Negara Terhadap Kualitas Laporan Keuangan

Dapat disimpulkan bahwa berdasarkan uji F, Etika (X1), Kompetensi (X2), dan Pengalaman (X3) secara simultan berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan. Sehingga membuktikan bahwa H_{a4} diterima H_{04} ditolak. Dapat dikatakan bahwa Etika, Kompetensi, dan Pengalaman dalam mengelola barang milik negara sudah baik dalam mengelola barang milik negara.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan di atas, maka saran yang dapat diberikan sebagai berikut:

1. Untuk Pegawai BKKBN Provinsi Sumatera Utara diharapkan dan disarankan untuk mempertimbangkan hasil penelitian ini sebagai bahan acuan dalam mengelola barang milik negara pada BKKBN Provinsi Sumatera Utara. Dan juga untuk terus mempertahankan serta meningkatkan etika, kompetensi, dan pengalaman dalam mengelola

barang milik negara agar dapat terus mempertahankan opini wajar tanpa pengecualian untuk tahun berikutnya.

2. Untuk peneliti selanjutnya yang ingin meneliti tentang pengelolaan barang milik negara, disarankan untuk dapat menambah variabel-variabel lainnya yang berhubungan dengan pengelolaan barang milik negara. Tidak hanya sebatas pada variabel-variabel yang peneliti ambil untuk diteliti.

DAFTAR PUSTAKA

- Atika. *Analisis Penerapan Akuntansi Syariah Sistem Bagi Hasil Dalam Program Tabungan Bank Syariah Mandiri Cabang Medan Dalam Jurnal Ekonomi Islam, Volume V, No.1*, 2020.
- Aprita, Serlika *Etika Profesi*, Jawa Timur: CV Penerbit Qiara Media, 2020.
- Djauzak, Ahmadi. *Peningkatan Mutu Pendidikan Sebagai Sarana Pembangunan Bangsa*, Jakarta: Balai Pustaka, 2004.
- Fauziah, Ifat. *SAP Standar Akuntansi Pemerintah*, Pamulang: ILMU, 2018.
- Fitra, Halkadri. *Analisis Neraca Dan Laporan Realisasi Anggaran Pemerintah Daerah*, Malang: CV IRDH, 2019.
- Harmai, Hendra. *Persepsi Islam Dalam Etika Berbisnis Berdasarkan Al Quran dan Hadist Dalam Jurnal Ekonomi dan Bisnis, Vol 8 Nomor 2*. 2011.
- Kementerian Agama RI. *Al-qur'an dan Terjemahan*, surabaya: Pustaka agung, 2006.
- Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. *Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI)*, Jakarta: Balai Pustaka, 2008.
- Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional
- Mardiasmo, *Akuntansi Sektor Publik*, Yogyakarta: CV Andi Offset, 2018.
- Nurdin, Ismail. *Etika Pemerintahan*, Lampung Timur: Lintang Rasi Aksara Books, 2017.
- Peraturan Direktur Jenderal Kekayaan Negara Nomor : Per-07/Kn/2009 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Rekonsiliasi Data Barang Milik Negara Dalam Rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Negara Dan Laporan Keuangan Pemerintah Pusat.
- Peraturan Menteri Keuangan nomor 171 /Pmk.05/2007 Tentang Sistem Akuntansi Dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat.
- Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah.
- Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 Pasal 1 tentang Sistem Pengendalian Internal Pemerintah.

- Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 Tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.
- Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2010 Tentang Badan Pendudukan Dan Keluarga Berencana Nasional.
- Pujanira, Putriasri. *Pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia, Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan, dan Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Provinsi DIY dalam Jurnal Nominal, Vol. VI nomor 2, 2017.*
- Rifa'i, Aditya Bachtiar. *Pengaruh Etika, Kompetensi, dan Pengalaman Dalam Mengelola Barang Milik Negara Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Pusat*, Skripsi: Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Yogyakarta, 2014.
- Saban dan Maryadi. *Business Ethics and Entrepreneurship (Etika & Kewirausahaan)*, Yogyakarta: Deeplubish, 2019.
- Sitompul, Syahman et. al. *Akuntansi Mesjid*, Medan: FEBI UIN-SU Press, 2015.
- Sutrisno, Edy. *Manajemen Sumber Daya Manusia*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2009.
- Tarigan, Azhari Akmal. *Tafsir Ayat-Ayat Ekonomi*, Medan: Citapustaka Media Printis, 2014.
- Teguh, Muhammad. *Metode Kuantitatif untuk Analisis Ekonomi dan Bisnis*, Jakarta: Rajawali Pers, 2014.
- Thoha, Miftah. *Kepemimpinan dalam Manajemen, Edisi 12*, PT: Raja Grafindo Persada, 2007.
- Trianto, Budi. *Riset Modeling Teori, Konsep dan Prosedur Melakukan Penelitian Serta Aplikasi Pengelolaan Data Penelitian dengan Program SPSS dan LISREL*, Pekan Baru: AdhDhuha Institute.
- Utomo, Ari. *Pengaruh Kompetensi Dan Pengalaman Dalam Mengelola Barang Milik Daerah Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Daerah Dengan Etika Sebagai Variabel Moderating*, Skripsi: Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Negeri Alauddin Makassar, 2017.
- Wibowo, *Manajemen Kinerja*, Jakarta: Rajawali Pers, 2016.
- Maxmanroe, "Pengertian Kompetensi:Definisi, Jenis-jenis dan Manfaat Kompetensi",
<https://www.maxmanroe.com/vid/manajemen/pengertian-kompetensi.html>

LAMPIRAN I

Surat Penelitian


bkkbn
Sumatera Utara

Nomor : 1162 /LB-002/J.6/2021
Sifat : Penting
Lampiran : -
Perihal : **Selesai Melakukan Riset**

Medan, 30 Juni 2021

Kepada Yth :

**Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Universitas Islam Negeri Sumatera Utara**

di -
Medan.-

Dengan hormat,

Berdasarkan Surat Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Nomor : B-4405/EB.I/KS.02/2020 tanggal 3 Desember 2020, Perihal: Permohonan Riset, bersama ini kami sampaikan bahwa :

Nama : Pazzlina Dewi
NIM/NPM : 0502173461
Jenjang Program : Strata -1 (S1)
Program Studi : Akuntansi Syariah

Telah selesai melakukan Riset pada Kantor Perwakilan BKKBN Provinsi Sumatera Utara dengan judul skripsi "*Pengaruh Etika, Kompetensi dan Pengalaman Dalam Mengelola Barang Milik Negara Terhadap Kualitas Laporan Keuangan (Studi Kasus Pada BKKBN Provinsi Sumatera Utara)*".

Demikian disampaikan, atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.


Kabid Labang

Dra. T. Lafalinda, M.Pd
NIP. 19630504 198903 2 002

Tembusan Yth :
Plt. Kepala Perwakilan BKKBN Prov. Sumatera Utara (sebagai laporan)

**Perwakilan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional
Provinsi Sumatera Utara**
Jl. Gunung Krakatau No. 110 Medan - 20239 | PO BOX 81 Mon
Telp. (061) 6612732 | Fax (061) 6610084 | Website: sumut.bkkbn.go.id
FB : @BKKBNsumut | IG : @bkkbnsumatera Utara

LAMPIRAN II

Kuesioner

PENGARUH ETIKA, KOMPETENSI, DAN PENGALAMAN DALAM MENGELOLA BARANG MILIK NEGARA TERHADAP KUALITAS LAPORAN KEUANGAN (STUDI PADA BKKBN PROVINSI SUMATERA UTARA)

A. Petunjuk Pengisian Kuesioner

1. Cara pengisian kuesioner adalah:
 - a. Semua pernyataan dijawab dengan cara memberikan tanda (√) pada salah satu jawaban yang tersedia dan paling tepat menurut persepsi Bapak/Ibu
 - b. Tidak ada benar atau salah dalam memberikan jawaban karena kami hanya memperhatikan pada suatu angka atau jawaban yang menunjukkan persepsi terbaik dari Bapak/Ibu
2. Terdapat beberapa pilihan pernyataan, yaitu:

STS	: Sangat Tidak Setuju
TS	: Tidak Setuju
N	: Netral
S	: Setuju
SS	: Sangat Setuju

B. Identitas Responden

1. Nama :
2. Jenis Kelamin :
3. Usia :
4. Pendidikan Terakhir :
5. Masa Kerja Sebagai Pengelola Keuangan atau Pengelola BMN
 - a. 1–3 Tahun
 - b. 4–7 Tahun
 - c. 8–11 Tahun
 - d. 11-15 Tahun
 - e. > 15 Tahun

DAFTAR PERNYATAAN TENTANG ETIKA (X1)

No	Pernyataan	STS	TS	N	S	SS
1.	Pengelola Asset BMN melaksanakan tugas mentaati peraturan perundang-undangan dengan pengabdian dan penuh tanggung jawab					
2.	Pengelola Asset BMN selalu bersikap dan berperilaku sesuai dengan etika					
3.	Pengelola Asset BMN harus memiliki pengetahuan, keahlian, dan keterampilan yang diperlukan untuk melaksanakan tugas					
4.	Saya harus selalu mempertahankan nama baik profesi dengan menjunjung tinggi etika serta hukum yang ada di Indonesia					
5.	Saya harus selalu mempertahankan tingkat integritas dan objectivitas yang tinggi dalam melakukan Pekerjaan					
6.	Saya harus meningkatkan kecakapan profesional sehingga mampu memberikan manfaat yang optimal bagi pemerintah dan masyarakat					
7.	Saya wajib menjunjung tinggi tanggung jawab moral, sosial dan profesional					
8.	Setiap bekerja dengan orang yang lebih tua walaupun pangkatnya lebih rendah dari saya, tetap saya hormati dan berperilaku sopan santun terhadap beliau					
9.	Pengelola BMN tidak mengelak atau menyalahkan orang lain yang dapat mengakibatkan kerugian orang lain.					

10.	Setiap pengelola BMN harus berperilaku yang konsisten dengan reputasi profesi yang baik dan menjauhi tindakan yang dapat merusak reputasi Profesi					
11.	Pengelola BMN tidak boleh memihak kepada siapapun yang mempunyai kepentingan atas hasil pekerjaannya.					
12.	Seorang pengelola Asset BMN tidak harus mengingat semua bab dan pasal yang terdapat dalam kode etik namun harus mengamalkannya					
13.	Saya boleh menggunakan pengetahuan atau informasi yang saya peroleh dari pelaksanaan tugas untuk kepentingan sendiri atau pihak ketiga					
14.	Pengelola Asset BMN selalu menimbang permasalahan berikut akibat-akibatnya dengan seksama.					
15.	Pengelola Asset BMN tidak mempertimbangkan keadaan seseorang / sekelompok orang untuk membenarkan perbuatan melanggar ketentuan atau peraturan perundangundangan yang berlaku.					

DAFTAR PERNYATAAN TENTANG KOMPETENSI (X2)

No	Pernyataan	STS	TS	N	S	SS
1.	Dalam mengelola BMN, Pengelola Aset memiliki kemampuan teknis yang memadai dalam bidangnya, sehingga laporan BMN memiliki kualitas yang baik					
2.	Dalam mengelola BMN, Pengelola Aset memiliki kecakapan dan latar belakang pendidikan yang sesuai dengan bidangnya					
3.	Pengelola Asset BMN mampu membuat keputusan yang berhubungan dengan pekerjaan					
4.	Pengelola Asset BMN mampu mengembangkan solusi alternatif dan rekomendasi serta memilih tindakan yang tepat dalam menunjang proses pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya					
5.	Pengelola aset lebih mendahulukan untuk mengikuti peraturan-peraturan yang berkaitan dengan urusannya (tugas dan tanggung jawabnya) baru kemudian bersenang-senang setelah tugasnya selesai					
6.	Bekerja dengan orang lain dalam satu tim, lebih sulit dari pada bekerja secara sendirian					
7.	Pengelola Asset BMN mampu menyelesaikan tugas kerja yang diberikan secara konsisten.					
8.	Pengelola Asset BMN senantiasa mengikuti dan melaksanakan instruksi-instruksi yang diberikan					
9.	Dalam menyesuaikan suatu masalah dengan masalah yang berbeda, dibutuhkan waktu yang relatif lama.					
10.	Selalu bekerja dengan arah yang pasti, ketika dalam menyelesaikan suatu masalah telah ada peraturan yang harus diikuti.					

11.	Pengelola Asset BMN telah memahami segala konsekuensi keputusan dan tindakan yang diambilnya sesuai dengan tugas dan tanggung jawabnya.					
12.	Pengelola Asset BMN hadir dan pulang secara rutin dan tepat waktu.					
13.	Sebagian besar sumber daya manusia pengelola BMN yang bekerja di BKKBN Provinsi Sumatera Utara berlatar belakang pendidikan keuangan.					
14.	Pengelola Asset BMN yang bekerja di BKKBN Provinsi Sumatera Utara telah sepenuhnya memahami teori-teori yang berkaitan dengan pengelolaan barang milik negara					
15.	Untuk mengelola BMN yang baik, Pengelola Asset membutuhkan pengetahuan yang diperoleh dari tingkat Pendidikan (D3, S1, S2, S3) dan dari kursus serta pelatihan.					

DAFTAR PERNYATAAN TENTANG PENGALAMAN (X3)

No	Pernyataan	STS	TS	N	S	SS
1.	Semakin lama menjadi Pengelola Asset BMN, semakin mengerti dalam memperoleh data dan informasi yang dibutuhkan.					
2.	Semakin lama bekerja sebagai Pengelola Asset BMN semakin dapat mengetahui informasi yang relevan untuk membuat laporan BMN setiap semester/tahunan.					
3.	Semakin kompleks tugas yang saya kerjakan, pengalaman saya semakin berkembang					
4.	Banyaknya tugas yang dihadapi selama masa kerja memberikan kesempatan untuk belajar dari kesalahan yang pernah dialami.					
5.	Semakin sering menyelesaikan tugas dalam Pengelolaan Asset BMN setiap tahunnya, semakin mengerti kondisi Asset BMN yang terdapat di kantor					
6.	Banyaknya tugas dan tanggung jawab yang di emban sebagai pengelola Asset BMN, maka semakin kompeten dalam menyelesaikan semua tugasnya					
7.	Saya membuat laporan pengelolaan Aset BMN lebih dari 2 tahun sehingga laporan yang saya buat lebih baik					
8.	Semakin saya sering bertemu dengan rekan sesama pengelola aset BMN, semakin bertambah wawasan mengenai pengelolaan BMN					
9.	Banyaknya tugas yang diterima dapat memacu Pengelola Asset BMN untuk menyelesaikan pekerjaan dengan cepat dan tanpa terjadi penumpukan tugas					

10.	Saya terbiasa membuat laporan BMN setiap tahun/semester, jadi saya akan membuat laporan BMN yang akan datang mendekati waktu deadline					
11.	Semakin lama bekerja sebagai Pengelola BMN, semakin dapat mengetahui informasi yang relevan untuk mengambil pertimbangan dalam membuat keputusan.					
12.	Semakin lama bekerja sebagai Pengelola BMN, semakin dapat mendeteksi kesalahan yang dilakukan.					
13.	Semakin kompleks tugas yang dikerjakan, pengalaman pengelola BMN semakin berkembang.					
14.	Banyaknya tugas yang dihadapi memberikan Kesempatan untuk belajar dari kegagalan dan keberhasilan yang pernah dialami.					
15.	Banyaknya tugas yang diterima dapat memacu auditor untuk menyelesaikan pekerjaan dengan cepat dan tanpa terjadi penumpukan tugas.					

**DAFTAR PERNYATAAN TENTANG KUALITAS LAPORAN
KEUANGAN (Y)**

No	Pernyataan	STS	TS	N	S	SS
1.	Laporan keuangan yang dihasilkan dapat membantu dalam memperkirakan aktivitas yang berhubungan dengan keuangan pada periode berikutnya					
2.	Laporan keuangan dapat membantu dalam pengambilan keputusan					
3.	Laporan keuangan yang berkualitas memenuhi persyaratan normatif yaitu relevan, andal, dapat dipercaya, dan dapat dibandingkan					
4.	Setiap informasi dalam laporan keuangan disertai dengan penjelasan yang rinci sehingga kekeliruan dalam interpretasi dan penggunaan informasi tersebut dapat dicegah.					
5.	Informasi dalam laporan keuangan telah menggambarkan secara jujur semua transaksi dan peristiwa lainnya yang seharusnya disajikan.					
6.	Informasi dalam laporan keuangan dinyatakan dalam istilah yang mudah dipahami.					
7.	Informasi yang disajikan dalam laporan keuangan dapat diuji, dan apabila pengujian dilakukan oleh pihak yang berbeda, hasilnya tetap menunjukkan simpulan yang tidak berbeda jauh					
8.	Laporan keuangan yang disajikan menggambarkan secara transparan dan dapat dipertanggungjawabkan kondisi keuangan kantor.					
9.	Seluruh informasi yang disajikan dalam laporan keuangan (Neraca, LRA, dan CaLK) dapat dipahami dengan mudah.					

10.	Informasi laporan keuangan yang akuntabel penting untuk mendapatkan opini audit Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK					
11.	Informasi yang saya sajikan dalam laporan keuangan telah jujur, benar menggambarkan transaksi dan peristiwa lainnya, dan memenuhi kebutuhan para pengguna serta tidak berpihak pada kepentingan pihak tertentu sehingga teruji kebenarannya dan bebas dari pengertian yang menyesatkan dan kesalahan yang bersifat material					
12.	Informasi yang termuat dalam laporan keuangan yang saya susun selalu dapat dibandingkan dengan laporan keuangan periode sebelumnya.					
13.	Dalam penyusunan laporan keuangan, saya telah menggunakan kebijakan akuntansi yang berpedoman pada SAP dari tahun ke tahun.					
14.	Laporan keuangan yang saya buat disusun secara sistematis sehingga mudah dimengerti dan dipahami.					
15.	Informasi yang saya sajikan dalam laporan keuangan telah jelas dan disajikan dalam bentuk serta istilah yang disesuaikan dengan batas pemahaman para pengguna.					

LAMPIRAN III

Fkuensi Data Berdasarkan Identitas

		Statistics			
		Jenis Kelamin	Usia	Pendidikan	Masa Kerja
N	Valid	17	17	17	17
	Missing	0	0	0	0

LAMPIRAN IV

Hasil Uji Validitas

1. Variabel Etika (X1)

	X1.2	X1.3	X1.4	X1.5	X1.6	X1.7	X1.8	X1.9	X1.10	X1.11	X1.12	X1.13	X1.14	X1.15	Total_X1	
X1.1	.712*	.388	.377	.525*	.319	.642*	.568*	.288	.425	.317	.255	.130	.500*	.510*	.684**	
	.001	.124	.136	.031	.212	.005	.017	.262	.089	.215	.323	.619	.041	.037	.002	
	17	17	17	17	17	17	17	17	17	17	17	17	17	17	17	
X1.2	.712*	.642*	.546*	.525*	.462	.388	.568*	.288	.561*	.179	.490*	.011	.500*	.510*	.710**	
	.001	.005	.023	.031	.062	.124	.017	.262	.019	.492	.046	.968	.041	.037	.001	
	17	17	17	17	17	17	17	17	17	17	17	17	17	17	17	
X1.3	.388	.642*	1	.560*	.365	-.030	.329	.515*	.586*	.706**	.574*	.499*	.043	.415	.222	.657**
	.124	.005	.019	.150	.910	.197	.034	.013	.002	.016	.042	.869	.097	.392	.004	
	17	17	17	17	17	17	17	17	17	17	17	17	17	17	17	
X1.4	.377	.546*	.560*	1	.474	.345	.411	.377	.563*	.723**	.457	.453	.230	.644**	-.046	.687**
	.136	.023	.019	.054	.176	.101	.136	.019	.001	.065	.068	.374	.005	.861	.002	
	17	17	17	17	17	17	17	17	17	17	17	17	17	17	17	
X1.5	.525*	.525*	.365	.474	1	.557*	.227	.055	.339	.339	.186	.502*	.579*	.830**	.609**	.760**
	.031	.031	.150	.054	.020	.381	.833	.183	.183	.476	.040	.015	.000	.010	.000	
	17	17	17	17	17	17	17	17	17	17	17	17	17	17	17	
X1.6	.319	.462	-.030	.345	.557*	1	.222	.034	.207	.072	.113	.383	.313	.666**	.528*	.543*
	.212	.062	.910	.176	.020	.392	.898	.426	.785	.666	.129	.221	.004	.029	.024	
	17	17	17	17	17	17	17	17	17	17	17	17	17	17	17	
X1.7	.642*	.388	.329	.411	.227	.222	1	.515*	.226	.346	.452	.085	-.062	.415	.138	.498*
	.005	.124	.197	.101	.381	.392	.034	.383	.174	.069	.745	.814	.097	.597	.042	
	17	17	17	17	17	17	17	17	17	17	17	17	17	17	17	
X1.8	.568*	.568*	.515*	.377	.055	.034	.515*	1	.561*	.697**	.317	.490*	-.168	.136	.129	.530*
	.017	.017	.034	.136	.833	.898	.034	.019	.002	.215	.046	.518	.603	.622	.029	
	17	17	17	17	17	17	17	17	17	17	17	17	17	17	17	
X1.9	.288	.288	.586*	.563*	.339	.207	.226	.561*	1	.742**	.577*	.515*	.206	.432	.026	.643**

X2.11	.465	.502*	.671*	.717*	.069	.668*	.502*	.673**	.461	.772**	1	.477	.203	.540*	.142	.752**
	.060	.040	.003	.001	.793	.003	.040	.003	.062	.000		.053	.433	.025	.588	.000
	17	17	17	17	17	17	17	17	17	17	17	17	17	17	17	17
X2.12	.000	.268	.309	.133	.353	.364	.000	.403	.599*	.412	.477	1	.426	.412	.236	.611**
	1.00	.298	.227	.611	.164	.150	1.00	.109	.011	.100	.053		.088	.100	.361	.009
	0	17	17	17	17	17	0	17	17	17	17	17	17	17	17	17
X2.13	-.054	-.114	.000	.113	.632*	.078	-.229	-.229	.511*	.176	.203	.426	1	.352	.235	.505*
	.837	.662	1.00	.665	.006	.767	.377	.377	.036	.500	.433	.088		.166	.363	.038
	17	17	0	17	17	17	17	17	17	17	17	17	17	17	17	17
X2.14	.443	.345	.405	.387	.610*	.486*	.345	.234	.249	.360	.540*	.412	.352	1	.596*	.763**
	.075	.175	.107	.125	.009	.048	.175	.365	.335	.156	.025	.100	.166		.011	.000
	17	17	17	17	17	17	17	17	17	17	17	17	17	17	17	17
X2.15	.386	.373	.271	-.054	.474	-.020	.289	.119	.127	-.076	.142	.236	.235	.596*	1	.533*
	.126	.140	.292	.836	.054	.938	.261	.648	.627	.771	.588	.361	.363	.011		.028
	17	17	17	17	17	17	17	17	17	17	17	17	17	17	17	17
Total_	.555*	.660*	.704*	.670*	.618*	.518*	.493*	.557*	.587*	.580*	.752**	.611**	.505*	.763**	.533*	1
X2	.021	.004	.002	.003	.008	.033	.044	.020	.013	.015	.000	.009	.038	.000	.028	
	17	17	17	17	17	17	17	17	17	17	17	17	17	17	17	17

*. Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed).

** . Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

3. Variabel Pengalaman (X3)

	X3.1	X3.2	X3.3	X3.4	X3.5	X3.6	X3.7	X3.8	X3.9	X3.10	X3.11	X3.12	X3.13	X3.14	X3.15	Total_X3	
X3.1	1	.563*	.263	.651*	.102	.584*	.736*	.589*	.228	.488*	.194	.141	-.008	.278	.484*	.530*	
		.019	.307	.005	.698	.014	.001	.013	.379	.047	.457	.590	.975	.281	.049	.029	
X3.2	17	17	17	17	17	17	17	17	17	17	17	17	17	17	17	17	
		.563*	1	.567*	.697*	.335	.665*	.761*	.634*	.280	.659**	.167	.447	.114	.442	.545*	.711**
X3.3		.019	.018	.002	.188	.004	.000	.006	.276	.004	.522	.072	.662	.075	.024	.001	
	17	17	17	17	17	17	17	17	17	17	17	17	17	17	17	17	
X3.4		.263	.567*	1	.480	.218	.285	.447	.335	.515*	.630**	.652**	.478	.214	.537*	.567*	.683**
	17	17	17	17	17	17	17	17	17	17	17	17	17	17	17	17	
X3.5		.651*	.697*	.480	1	.150	.673*	.671*	.403	.249	.786**	.368	.337	.325	.518*	.393	.696**
	17	17	17	17	17	17	17	17	17	17	17	17	17	17	17	17	
X3.6		.005	.002	.051	.565	.003	.003	.109	.334	.000	.146	.185	.203	.033	.119	.002	
	17	17	17	17	17	17	17	17	17	17	17	17	17	17	17	17	
X3.7		.102	.335	.218	.150	1	.178	.244	.244	.317	.047	.112	.329	.459	.679**	.532*	.572*
	17	17	17	17	17	17	17	17	17	17	17	17	17	17	17	17	
X3.8		.698	.188	.400	.565	.494	.345	.345	.215	.857	.670	.198	.064	.003	.028	.016	
	17	17	17	17	17	17	17	17	17	17	17	17	17	17	17	17	
X3.9		.584*	.665*	.285	.673*	.178	1	.636*	.636*	-.018	.633**	.436	.536*	.233	.614**	.627**	.678**
	17	17	17	17	17	17	17	17	17	17	17	17	17	17	17	17	
X3.10		.014	.004	.268	.003	.494	.006	.006	.944	.006	.080	.027	.369	.009	.007	.003	
	17	17	17	17	17	17	17	17	17	17	17	17	17	17	17	17	
X3.11		.736*	.761*	.447	.671*	.244	.636*	.625*	.625*	.082	.470	.364	.214	.060	.501*	.634**	.648**
	17	17	17	17	17	17	17	17	17	17	17	17	17	17	17	17	
X3.12		.001	.000	.072	.003	.345	.006	.007	.754	.057	.150	.410	.820	.041	.006	.005	
	17	17	17	17	17	17	17	17	17	17	17	17	17	17	17	17	
X3.13		.589*	.634*	.335	.403	.244	.636*	.625*	1	.329	.587*	.243	.641**	.179	.400	.761**	.690**
	17	17	17	17	17	17	17	17	17	17	17	17	17	17	17	17	
X3.14		.013	.006	.188	.109	.345	.006	.007	.197	.013	.347	.006	.491	.111	.000	.002	
	17	17	17	17	17	17	17	17	17	17	17	17	17	17	17	17	
X3.15		.228	.280	.515*	.249	.317	-.018	.082	.329	1	.441	.277	.621**	.558*	.229	.388	.599*
	17	17	17	17	17	17	17	17	17	17	17	17	17	17	17	17	
X3.16		.379	.276	.034	.334	.215	.944	.754	.197	.076	.281	.008	.020	.377	.124	.011	
	17	17	17	17	17	17	17	17	17	17	17	17	17	17	17	17	
X3.17		.488*	.659*	.630*	.786*	.047	.633*	.470	.587*	.441	1	.423	.626**	.380	.443	.533*	.747**
	17	17	17	17	17	17	17	17	17	17	17	17	17	17	17	17	
X3.18		.047	.004	.007	.000	.857	.006	.057	.013	.076	.091	.007	.132	.075	.028	.001	

	17	17	17	17	17	17	17	17	17	17	17	17	17	17	17	17
X3.11	.194	.167	.652*	.368	.112	.436	.364	.243	.277	.423	1	.501*	.417	.630**	.573*	.610**
	.457	.522	.005	.146	.670	.080	.150	.347	.281	.091		.040	.096	.007	.016	.009
	17	17	17	17	17	17	17	17	17	17	17	17	17	17	17	17
X3.12	.141	.447	.478	.337	.329	.536*	.214	.641*	.621*	.626**	.501*	1	.514*	.584*	.638**	.760**
	.590	.072	.052	.185	.198	.027	.410	.006	.008	.007	.040		.035	.014	.006	.000
	17	17	17	17	17	17	17	17	17	17	17	17	17	17	17	17
X3.13	-.008	.114	.214	.325	.459	.233	.060	.179	.558*	.380	.417	.514*	1	.440	.432	.615**
	.975	.662	.410	.203	.064	.369	.820	.491	.020	.132	.096	.035		.077	.083	.009
	17	17	17	17	17	17	17	17	17	17	17	17	17	17	17	17
X3.14	.278	.442	.537*	.518*	.679*	.614*	.501*	.400	.229	.443	.630**	.584*	.440	1	.777**	.804**
	.281	.075	.026	.033	.003	.009	.041	.111	.377	.075	.007	.014	.077		.000	.000
	17	17	17	17	17	17	17	17	17	17	17	17	17	17	17	17
X3.15	.484*	.545*	.567*	.393	.532*	.627*	.634*	.761*	.388	.533*	.573*	.638**	.432	.777**	1	.859**
	.049	.024	.018	.119	.028	.007	.006	.000	.124	.028	.016	.006	.083	.000		.000
	17	17	17	17	17	17	17	17	17	17	17	17	17	17	17	17
Total_	.530*	.711*	.683*	.696*	.572*	.678*	.648*	.690*	.599*	.747**	.610**	.760**	.615**	.804**	.859**	1
X3	.029	.001	.003	.002	.016	.003	.005	.002	.011	.001	.009	.000	.009	.000	.000	
	17	17	17	17	17	17	17	17	17	17	17	17	17	17	17	17

*. Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed).

** . Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

	17	17	17	17	17	17	17	17	17	17	17	17	17	17	17	17
Y.11	.436	.140	.554*	.564*	.034	.646*	.545*	.701*	.272	.290	1	.581*	.349	.363	.522*	.706**
	.080	.591	.021	.018	.897	.005	.024	.002	.291	.259		.014	.169	.152	.032	.002
	17	17	17	17	17	17	17	17	17	17	17	17	17	17	17	17
Y.12	.114	.378	.499*	.215	.378	.442	.138	.631*	.558*	.372	.581*	1	.363	.576*	.598*	.763**
	.662	.134	.042	.407	.134	.076	.597	.007	.020	.142	.014		.152	.016	.011	.000
	17	17	17	17	17	17	17	17	17	17	17	17	17	17	17	17
Y.13	.129	-.128	.043	.109	.546*	.083	.011	.000	.483*	-.037	.349	.363	1	.504*	.501*	.583*
	.622	.623	.869	.676	.023	.751	.968	1.00	.049	.889	.169	.152		.039	.041	.014
	17	17	17	17	17	17	17	17	17	17	17	17	17	17	17	17
Y.14	.199	.329	.238	.119	.808*	.284	-.066	.110	.084	.068	.363	.576*	.504*	1	.815**	.676**
	.444	.198	.358	.648	.000	.269	.802	.675	.748	.795	.152	.016	.039		.000	.003
	17	17	17	17	17	17	17	17	17	17	17	17	17	17	17	17
Y.15	.353	.340	.401	.127	.496*	.209	.177	.340	.255	.185	.522*	.598*	.501*	.815**	1	.728**
	.165	.182	.110	.626	.043	.420	.498	.182	.323	.478	.032	.011	.041	.000		.001
	17	17	17	17	17	17	17	17	17	17	17	17	17	17	17	17
Total	.525*	.592*	.679*	.628**	.489*	.578*	.487*	.634*	.544*	.574*	.706**	.763*	.583*	.676**	.728**	1
_Y	.030	.012	.003	.007	.046	.015	.047	.006	.024	.016	.002	.000	.014	.003	.001	
	17	17	17	17	17	17	17	17	17	17	17	17	17	17	17	17

*. Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed).

** . Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

LAMPIRAN V

Hasil Jawaban Responden

No Responden	Etika (X1)	Kompetensi (X2)	Pengalaman (X3)	Kualitas Laporan Keuangan (Y)
1.	69	70	72	69
2.	59	58	58	58
3.	60	60	63	62
4.	60	60	60	60
5.	51	51	51	51
6.	44	52	45	47
7.	61	61	63	58
8.	56	57	56	56
9.	47	40	45	43
10.	61	61	61	61
11.	68	69	68	68
12.	65	65	63	61
13.	54	54	54	54
14.	58	60	60	60
15.	45	50	45	46
16.	52	52	52	52
17.	57	60	70	60

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

I. IDENTITAS PRIBADI

1. Nama : Pazlinna Dewi
2. NIM : 0502173461
3. TTL : Medan, 28 Desember 1998
4. Pekerjaan : Mahasiswa
5. Alamat : Jl. Trimurti Pasar IV Gg Bersama 8

II. RIWAYAT PENDIDIKAN

1. Tamatan SD Perguruan Islam Teladan Berijazah Tahun 2011
2. Tamatan SMP Negeri 23 Medan Berijazah Tahun 2014
3. Tamatan SMK Negeri 6 Medan Berijazah Tahun 2017
4. Tamatan Universitas Islam Negeri Sumatera Utara 2021

III. Riwayat Organisasi

1. Pramuka SMP Negeri 23 Medan
2. Paduan Suara SMK Negeri 6 Medan
3. Himpunan Mahasiswa Jurusan Akuntansi Syariah (HMJ) UINSU